

PROPOSAL PENELITIAN

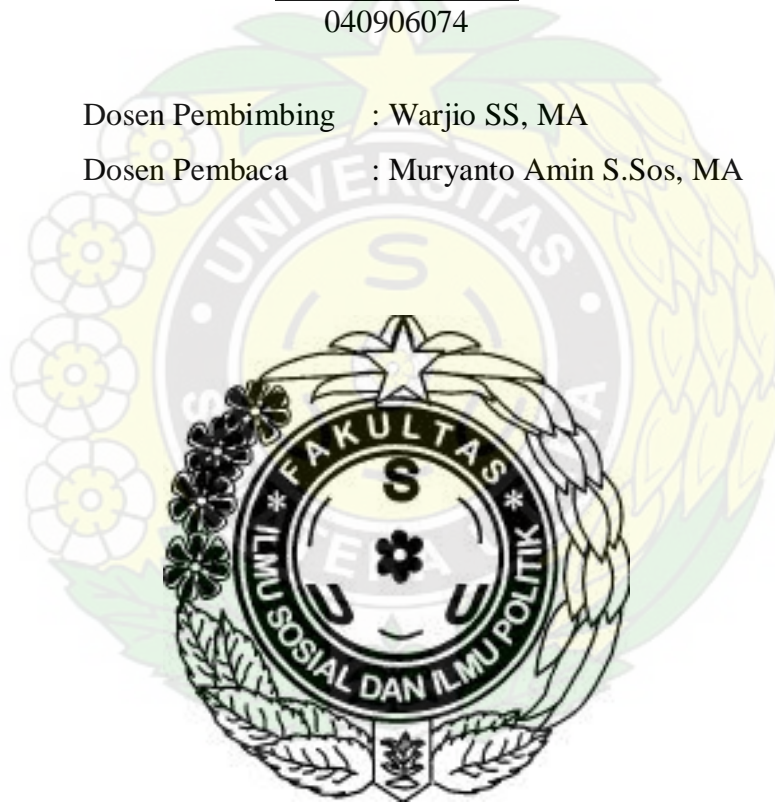
**RELASI BIROKRASI DAN POLITIK
(ANALISIS POLA PEREKRUTAN KEPALA BIRO DAN KEPALA
DINAS PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SUMUT PASCA
PILGUBSU 2008)**

Disusun Oleh

M AKHYAR HSB
040906074

Dosen Pembimbing : Warjio SS, MA

Dosen Pembaca : Muryanto Amin S.Sos, MA



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	01
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
1.4.3. Manfaat Akademis.....	13
1.5. Kerangka Dasar Pemikiran.....	13
1.5.1. Birokrasi.....	14
1.5.1.1. Birokrasi Sebagai Mesin Politik.....	16
1.5.2. Politik.....	18
1.5.2.1. Kekuasaan Politik.....	19
1.5.2.2. Birokrasi Politik.....	20
1.5.3. Politik Birokrasi Pemerintah.....	21
1.5.4. Ekonomi Politik.....	22
1.5.4.1. Proses Timbal Balik Ekonomistik dan Politik.....	22
1.5.5. Kepemimpinan.....	23
1.5.6. Konsensus Politik.....	25
1.5.6.1. Tawar Menawar (bargaining).....	25
1.5.7. Rekrutmen Politik.....	26
1.5.7.1. Pengertian Rekrutmen Politik.....	26
1.5.7.2. Bentuk-Bentuk Rekrutmen Politik.....	28
1.5.7.3. Pertimbangan Rekrutmen Politik.....	30

1.5.8. Intervensi Politik.....	30
1.5.8. Relasi Kekuasaan.....	31
1.6. Metodologi Penelitian.....	34
1.6.1. Jenis Penelitian.....	34
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.6.3. Teknik Analisis Data.....	35
1.7. Sistematika Penulisan.....	37

BAB II DESKRIPSI LOKASI

2.1. Sejarah Singkat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.....	39
2.1.1. Terbentuknya Provinsi Sumatera Utara.....	40
2.1.2. Arti Logo Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.....	42
2.1.3. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.....	43
2.2. 10 Prinsip Good Governance.....	45
2.2.1. Visi misi.....	46
2.2.2. Program Prioritas.....	49
2.2.3. Gubernur Sumatera Utara.....	51
2.3. Pemprov di Bawah Kepemimpinan Gubernur H Syamsul Arifin SE.	52
2.3.1. Struktur Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.....	61

BAB III KAJIAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.....	64
3.2. Rekrutmen Kepala Biro dan Kepala Dinas Provinsi Sumut di Bawah Pemerintahan Syamsul Arifin.....	68

3.3. Analisis Pola Perekrutan Kepala Biro dan Kepala Dinas Pada
Pemerintahan Provinsi Sumut Pasca Plgubsu..... 72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan..... 82
4.2. Saran..... 85

Daftar Pustaka.....



ABSTARKSI

RELASI BIROKRASI DAN POLITIK

(ANALISIS POLA PEREKRUTAN KEPALA BIRO DAN KEPALA DINAS PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SUMUT PASCA PILGUBSU 2008)

Birokrasi dan politik bagai dua mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan satu sama lain. Birokrasi dan politik memang merupakan dua buah institusi yang memiliki karakter yang sangat berbeda, namun harus saling mengisi. Dua karakter yang berbeda antara dua institusi ini pada satu sisi memberikan sebuah ruang yang positif bagi apa yang disebut dengan *sinergi*, namun acapkali juga tidak dapat dipisahkan dengan aroma perselingkuhan. Perekrutan kepala biro dan kepala dinas pada pemerintahan provinsi Sumut pasca pilgubsu 2008, mencuri perhatian publik karena di khawatirkan penuh dengan intervensi terhadap Gubernur dalam menempatkan pejabat dalam jabatan struktural dari berbagai pihak. Hal ini terjadi karena berlarut-larutnya Gubernur H. Syamsul Arifin SE melantik pejabat kedalam jabatan struktural semenjak ia dilantik. sehingga muncul dugaan apakah orang yang diangkat sesuai dengan merit system (pola karir) atau spoil system (membagi-bagikan jabatan kepada sahabat atau rekan satu partai politik).

Kata kunci : Birokrasi, Politik, Kepala Biro, Kepala Dinas, Pemerintahan Sumatera Utara, Pilgubsu 2008.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Birokrasi dan politik bagai dua mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan satu sama lain. Birokrasi dan politik memang merupakan dua buah institusi yang memiliki karakter yang sangat berbeda, namun harus saling mengisi. Dua karakter yang berbeda antara dua institusi ini pada satu sisi memberikan sebuah ruang yang positif bagi apa yang disebut dengan *sinergi*, namun acapkali juga tidak dapat dipisahkan dengan aroma perselingkuhan.

Sebagaimana disebut Syafuan Rozi di dalam kamus berbahasa Jerman (1813) menyatakan bahwa birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintahan dan cabang-cabangnya memperebutkan sesuatu untuk kepentingan diri mereka sendiri, atau sesama warga negara¹. Ciri khas birokrasi adalah bentuk institusi yang berjenjang, rekrutmen berdasarkan keahlian, dan bersifat *impersonal*. Sedangkan politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebahagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis².

Wacana demokratisasi di Indonesia telah menghantarkan publik untuk mengoperasionalkan proses berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab. Keberhasilan bangsa Indonesia melewati proses pemilihan anggota legeslatif dan DPD serta pemilihan Presiden secara langsung yang berjalan lancar dalam suasana aman dan tentram merupakan bukti kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang telah terkonstruksikan secara optimal.

Pasca gerakan reformasi pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan pemberian otonomi daerah bagi seluruh Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, lahir UU No. 32 tahun

¹ Syafuan Rozi, "*Zaman Bergerak Reformasi di Rombak*". Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006. Hal.9-10

² Miriam Budiarto, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*". Jakarta:PT. Gramedia Pustaka, 2008. Hal.15

2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No.6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah, merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) secara langsung³.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang diamandemen yakni pasal 18 (4) yang menyatakan bahwa⁴ :

Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis, yakni pemilihan kepala pemerintah daerah dilaksanakan secara langsung (Pilkada). Hal tersebut sesuai dengan nafas demokrasi yang merupakan sistem politik yang menetapkan kekuasaan dari oleh dan untuk rakyat sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu pencetus ajaran Trias Politika.

Model pilkada dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan, karena sebelumnya tidak pernah ada ketentuan yang sejenis yang mengatur tentang pilkada secara demokratis, dan dipilih langsung oleh rakyat. Peraturan sebelumnya mengatur pilkada melalui sistem perwakilan, yakni kepala daerah dipilih oleh DPRD baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Model pilkada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disebut KPUD) sesuai dengan UU No.2 tahun 2004, bukanlah kegiatan yang bersifat formalitas atau *seremonial* demokrasi dalam memilih kepala daerah, melainkan pilkada berperan sebagai media dalam mengantarkan rakyat menuju terselenggaranya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat⁵.

Selama ini pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara *representatif* oleh lembaga legesltif daerah justru menutup “*keran*” akses masyarakat terhadap kepala daerah. Sebab bangunan politik yang termanifestasi masih cenderung *absurd* antara peran legeslatif sebagai *representasi* warna ideologi politik dalam hal ini basis massa pemilihnya atau *representasi*

³ Daniel S. Slossa, “*Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Secara Langsung*”, Yogyakarta: Media Presindo. 2005. Hal.9

⁴ Ermaya, Suradinata, “*Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*”, Jakarta:PT. Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2008. Hal.65

⁵ Ibid Hal. 66-67

keseluruhan masyarakat dalam wilayah tersebut⁶. Peran yang masih *absurd* tersebut tidak dapat dibenarkan atau disalahkan akan tetapi kembali pada kapasitas anggota legeslatif dalam memposisikan diri walaupun dalam hal ini bermuatan nilai dan kepentingan.

Sejak pilkada bergulir pada pertengahan tahun 2004, para pejabat pemerintah atau birokrat banyak yang turut ambil bagian. Mereka meninggalkan jabatannya untuk meraih jabatan yang lebih tinggi. Dari hasil pilkada langsung sejak Juni 2005 yang sudah menghasilkan lebih dari 270 kepala daerah, hampir 40 persen dimenangkan kalangan birokrat⁷. Birokrat yang *notabene* adalah pegawai negeri sipil (PNS) memang tidak dilarang mencalonkan diri dalam pilkada.

Diterapkannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, menjanjikan sejumlah harapan, antara lain, diyakini akan mampu untuk mewujudkan tatanan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Namun demikian, juga harus disadari bahwa *ekspektasi* tersebut hanya akan dapat mencapai, atau paling tidak, mendekati kenyataan, bila berangkat dari asumsi *substantive democracy*, yaitu suatu tatanan demokrasi yang telah di tandai oleh eksisnya perilaku demokrasi (*democratic behaviour*) baik pada tataran elit penyelenggara pemerintahan, maupun di kalangan masyarakat. maka dapat dipastikan sebahagian besar masyarakat telah memahami betul arti penting Pilkada, dan kalaupun diberikan hak kebebasan politik (*political liberties*), mereka telah memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan, dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara rasional⁸.

Dalam kondisi sebahagian besar masyarakat pemilih yang relatif belum memahami betul nilai penting dari Pilkada, maka sulit dihindari jika kemudian keputusan dalam memberikan suara lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat

⁶ Widya Wicaksono, kristian. “*Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*”. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006, hal.104

⁷ Dapat dilihat pada [http://www.transparansi.or.id/birokrat/Masih/Jadi/"Anak/Manis"/dalam/Pilkada.html](http://www.transparansi.or.id/birokrat/Masih/Jadi/) diakses pada tanggal 18 april 2009

⁸ Dapat dilihat pada <http://www.google.co.id/Search/Bisnis/dan/Politik/di/Tingkat/Lokal:/Pengusaha,/Penguasa/&/Penyelenggaraan/Pemerintahan/Daerah/Pasca/Pilkada.html> dikases tanggal 15 maret 2009

pragmatis, misalnya: apa keuntungan jangka pendek yang dapat diperoleh dari kandidat kepala daerah, dan siapa tokoh-tokoh panutan yang memiliki kesamaan dengan si kandidat. Proses Pilkada yang dilaksanakan dalam suasana seperti ini, tentunya, memiliki sejumlah implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pilkada. Diantara bahaya yang sangat mungkin terjadi adalah, munculnya praktik *Shadow State* dan *Informal Economy* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pilkada.

Pada kondisi dilapangan, birokrasi justru kerap digunakan sebagai alat politik kepala daerah yang berasal dari institusi politik untuk kepentingan pendukungnya atau pemilihnya sehingga dapat dipastikan bahwa *independensi* birokrasi tidak bisa lepas dari intervensi-intervensi politik yang akhirnya menjadikan birokrasi tidak netral. Intervensi politik dalam birokrasi di negeri ini mempunyai catatan panjang. Pada masa Orde Baru intervensi bersifat *monolitik* oleh Golkar. Setelah reformasi, dengan banyaknya partai, intervensi terhadap birokrasi bersifat *polisentris*, Intinya sama saja memanfaatkan birokrasi untuk partai⁹.

Fakta-fakta yang terjadi banyak menunjukkan bahwasanya kepala daerah sangat sulit mempertahankan netralitasnya dalam menjalankan roda pemerintahan, dan termasuk didalamnya proses rekrutmen pejabat yang menjadi perpanjangan tangan kepala daerah. Di tempat yang lain, birokrasi sebagai sebuah sistem justru masih kental dengan nuansa hubungan pribadi antara pimpinan dan bawahan (*patron client*). Ini menunjukkan bahwa pejabat yang berkarir pada bidang institusi birokrasi, tidak memiliki kuasa berhadapan dengan jabatan struktural politis yang menjadi rahasia umum memang dikuasai oleh nuansa politik.

Ironis memang dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutamanya dalam sistem rekrutmen jabatan penting, masih berlandaskan kontrak-kontrak kepentingan para elit atau kelompok yang bersifat *tendensius* (saling meyenangkan) dan lebih mementingkan

⁹ Dapat dilihat pada <http://www.kompas.com/Birokrasi/Versus/Intervensi/Politik.html> diakses tanggal 19 april 2009

kepentingan kedekatan. Dan puncak klimaksnya, kapabilitas dan kompetensi yang benar-benar dimiliki seseorang akan dikesampingkan dan terbuang dengan sendirinya. Mark Turner dan David Hulme dalam bukunya *Governance, Administration and Development* (1997) menyatakan bahwa kemunculan permasalahan terhadap tingkat profesionalitas birokrasi pada negara dunia merupakan implikasi dari kolonialisme¹⁰.

Fenomena penting yang terjadi seiring masuknya aktor-aktor politik baru dalam sistem pemerintahan pasca gerakan 1998 adalah kecenderungan terjadinya intervensi politisi terhadap kebijakan birokrasi. Dalam hal ini yang sering muncul terganggunya kinerja birokrasi yang seharusnya berpedoman pada sistem *merit*. Pada beberapa kasus, tidak jarang birokrat yang memiliki kinerja bagus justru mendapat tekanan politik¹¹. Intervensi alias campur tangan banyak mengandung nuansa negatif. Namun semestinya tidak harus begitu, intervensi yang berakibat terjadinya ketidakstabilan terhadap sebuah proses manajemen internal bisa dikatakan negatif¹².

Akan tetapi ada kemungkinan intervensi yang dilakukan justru akan semakin memperkuat proses manajemen yang tengah berlangsung. Karena itu intervensi dapat bersifat positif atau negatif, amat tergantung dari seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari intervensi atau campur-tangan tersebut. Dampak intervensi politisi, menyebabkan *merit system* sebagai mekanisme standar dalam proses birokrasi menjadi sulit terlaksana. Keputusan-keputusan yang seharusnya diambil melalui pertimbangan objektif tidak jarang berbelok untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu.

¹⁰ Widya Wicaksono, Kristian. Op.Cit., Hal. 10

¹¹ Dapat dilihat pada <http://www.ugm.ac.id/Pasca/1998/Muncul/Intervensi/Politisi/Terhadap/Promosi/dan/Depromosi/Jabatan/Struktural/Birokrasi.html> diakses 19 april 2009

¹² Dapat dilihat pada <http://smpplklaten.pangudiluhur.org/Intervensi/Dalam/Otonomi/Sekolah.html> diakses pada tanggal 19 april 2009

Dua persoalan mendasar terkait dengan dinamika antara politisi dengan birokrasi, yaitu bentuk intervensi politik dan implikasi terjadinya intervensi politik tersebut. intervensi baik yang dilakukan oleh politisi maupun birokrasi tidak selalu bersifat negatif. Intervensi yang dilakukan menggunakan koridor kerja sama yang bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengakomodasikan kepentingan publik tentu menjadi sebuah bentuk intervensi yang positif. Intervensi negatif baru terjadi saat hal tersebut dilakukan dalam koridor yang salah, hanya untuk memaksimalkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang sedang berkuasa¹³. Mekanisme intervensi yang semacam ini dapat dipastikan akan melanggar berbagai nilai *merit system* yang tak jarang akan menciptakan sebuah dinamika politik.

Birokrasi tetap membutuhkan dukungan politisi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkannya. Disisi lain, politisi juga membutuhkan dukungan birokrasi yang pada tataran *riil* berfungsi sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan publik. Bagaimanapun ruang interaksi yang terbangun antara birokrasi dan politisi mengharuskan adanya saling dukung atau hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya, dalam artian saling mendukung sesuai dengan koridor tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga pola realasi yang akan terbentuk adalah relasi yang saling memperkuat yang akhirnya bermuara pada terakomodasinya kepentingan-kepentingan publik secara lebih baik.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara langsung yang pertama kali dilaksanakan, berlangsung pada hari Rabu tanggal 16 april 2008. Pilkada tersebut berhasil menghantarkan kemenangan mutlak pada pasangan dengan nomor urut 5, yang diusung oleh 11 koalisi partai yakni : PKS, PBB, PPP, Partai Patriot Pancasila, PKPB, PKP Indonesia, PPNUI, Partai Merdeka, PPDI, PSI, dan

¹³ Dapat dilihat pada <http://www.ugm.ac.id/Pasca/1998/Muncul/Intervensi/Politisi/Terhadap/Promosi/dan/Promosi/Jabatan/Struktural/Birokrasi.html> diakses 19 april 2009

PPDK yakni H. Syamsul Arifin, SE sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Gatot Pujo Nugroho, ST sebagai Wakil Gubernur Sumatera (Wagubsu) pada tanggal 16 juni 2008.

Dengan total perolehan suara sebanyak 1.396.892 suara sah atau 28,31 persen dari 4.933.687 DPT, yang terdiri dari 26 kota/kabupaten, 325 kecamatan dan 5.456 kabupaten yang ada di Sumatera Utara (Sumut) meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Asahan, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Pematang Siantar, Toba Samosir, Samosir, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Langkat, Binjai, Batu Bara¹⁴.

Dalam tatanan pemerintahan daerah, momentum pilkada menjadi semacam ajang perjudian bagi keberlangsungan hubungan birokrasi dan politik. Dalam berbagai momen pejabat kepala daerah ataupun calon kepala daerah baik yang berasal dari kalangan birokrat ataupun partai politik, sering sekali menggunakan birokrasi sebagai alat politik yang sangat efektif dalam membantu atau mempermudah jalan menuju kemenangan pada pilkada. Berbagai kejadian dan kepentingan yang ada, biasanya mempengaruhi proses kerja sama antara birokrasi dan politik.

Kondisi diatas tersebut erat kaitannya dengan keputusan gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin, SE yang berpedoman kepada PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan perda Sumut No. 7,8,9 tahun 2008 tentang¹⁵. Beberapa bulan setelah dilantik diawal tahun 2009 pada bulan januari dengan melantik melantik 18 pejabat dari 42 pejabat eselon II tahap pertama yang ada dilingkungan pemprov sumut. Gubernur H.

¹⁴ Dapat di lihat pada <http://www.kpusumut.org> rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi. Diakses tanggal: 11 februari 2008.

¹⁵ Dapat dilihat pada <http://www.bainfokomsu-online.com/Indeks-Berita/Pelantikan-Eselon-II-Pekan-Ini.html> diakses tanggal 13 februari 2009

Syamsyul Arifin SE melakukan perombakan sekitar 15 jabatan pada jenjang asisten, kepala dinas, kepala bagian, sekretaris, inspektur dan staf ahli.

Tercatat dua pejabat struktural baru yang ikut dilantik, yakni staf Badan Diklat Provinsi Sumut yang menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut. Sisanya merupakan pejabat struktural lama yang sebagian menempati pos lamanya yang kini berubah nama, maupun dimutasikan ke pos baru. Pejabat lama yang tetap dilantik untuk posisinya yang lama adalah Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Inspektorat dan Sekretaris DPRD Sumut.

Sedangkan pejabat yang menempati pos lama namun dengan nama instansi yang baru adalah, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) yang kini instansinya berganti nama menjadi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang kini menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pejabat lainnya dimutasikan ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) baru seperti Asisten Bina Hukum dan Sosial Setda menjadi Asisten Administrasi Umum dan Aset, Kepala Badan Diklat menjadi Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Kepala Badan Diklat, Kepala Biro Pemerintahan menjadi Kepala BKD, Kepala Badan Investasi dan Promosi menjadi Staf Ahli Gubernur, Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi menjadi Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Staf Ahli Gubernur, dan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang naik menjadi Kepala Bappeda¹⁶.

¹⁶ Keputusan Gubernur Sumut No. 821.23/302/2009

Sementara itu Gubernur H. Syamsyul Arifin SE belum melantik beberapa jabatan dinas dan biro yang sangat penting dan strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Ini menunjukkan adanya intervensi politik terhadap birokrasi yang efeknya netralitas dan independensi birokrasi menjadi goyah. Sebab SPKD yang vital dalam pemerintahan daerah yang hakekatnya diutamakan untuk dipilih dan dilantik malah diundur dan ditunda sehingga otomatis program kerja daerah berjalan dengan lambat, disini jelas kepentingan politik mempengaruhi kebijakan kepala daerah. Instansi strategis tersebut yaitu : dinas pendapatan, dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas pengairan, badan perizinan satu atap, dinas peternakan, dinas kehutanan, dinas tarukim, dinas perindustrian dan perdagangan, dan delapan biro.

Pada keputusan Gubernur yang lahir kemudian rabu 18 maret 2009, memuat beberapa perubahan 14 jabatan eselon II tahap kedua, antara lain kadis pengelolaan sumber daya air, kadis pendidikan, kadis kesehatan, kadis perhubungan, kadis kehutanan, kadis perindustrian dan perdagangan, kadis pendapatan daerah, kadis tenaga kerja dan transmigrasi, kaban pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kasat pol PP, sekretaris daerah, kabiro sekretaris daerah, kabiro pemukiman umum sekretaris daerah, kabiro pembinaan sosial sekretaris daerah¹⁷.

Keputusan yang diambil oleh Syamsul Arifin tentu saja merupakan hak *prerogatif* kepala daerah, namun tak dapat dihindari menimbulkan dampak politik, karena perombakan pejabat daerah ini masih juga menyisahkan sekitar 22 jabatan lagi. Hingga pengangkatan tahap ketiga pada 17 maret 2009 yang mengangkat 6 kadis, 2 kabiro dan 2 kepala badan¹⁸. Masih bimbangny Gubernur melantik para pejabat struktural, menimbulkan banyak pertanyaan atas sikap Gubernur dalam menempatkan pejabat pada posisi eksklusif di

¹⁷ Keputusan Gubernur Sumut No. 821.23/726/2009

¹⁸ Keputusan Gubernur Sumut No. 821.23/1331/2009

pemerintahan daerah dan disinyalir mendapat intervensi dari institusi politik yang ingin menempatkan orang-orangnya pada struktur pemerintahan Syamsul Arifin.

Berbagai pandangan dan tanggapan yang muncul dalam masyarakat mengenai pola rekrutmen dan rotasi posisi jabatan struktural di pemprov merupakan bentuk penolakan kepala daerah terpilih atas kinerja pejabat sebelum pilkada, atau apakah Gubernur terpilih menilai pejabat yang baru lebih sesuai dengan kompetensinya, atau atas pertimbangan lain. Pertanyaan tersebut menjadi isu kunci yang hendak dijawab oleh penelitian ini. Masalah pokok dalam kebijaksanaan kepegawaian ialah apakah orang-orang yang diangkat dalam jabatan administrasi atas dasar *prefensi* politis atau atas dasar syarat-syarat (kecocokan) individual¹⁹.

Harus diakui ketika pilgubsu yang lalu, Gubernur Syamsul Arifin tidak hanya bermodalkan sosial tetapi juga modal politik dan ekonomi, untuk menjadi Gubernur memerlukan *ongkos* politik yang sangat besar²⁰. Konsekuensinya tentu Gubernur dalam menentukan kebijakan tidak terlepas dari berbagai kepentingan partai politik dan pemilik modal. Sehingga pola rekrutmen jabatan struktural dikhawatirkan mengabaikan dasar-dasar *merit system* atau karir dan prestasi seorang pegawai yang dalam perkembangannya orang ini naik tingkat melalui tingkatan yang sudah diketahui hingga mencapai puncak jabatan dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang tertinggi²¹.

Berganti dengan pertimbangan *like or dislike*, dengan menempatkan siapa saja yang dekat dengan pimpinan kekuatan politik atau pemilik modal akan diprioritaskan meskipun mereka tidak memiliki spesifikasi dan kualifikasi yang di perlukan dalam jabatan birokrasi

¹⁹ Pamoedji, "*Pokok-Pokok Kebijakan dan Teknik Management Kepegawaian*". Jakarta: Pusat Pendidikan Depdagri, 1974. Hal.4

²⁰ Harian Waspada Edisi 3 Februari 2009, Medan. Warjio, *Kabinet Syampurno dan Ekonomi Politik Bayangan*.

²¹ Pamoedji, Op.Cit., Hal.22

tersebut (*dilema loyalitas dan kompetensi*). Hal ini disebut dengan *spoil system* atau sistem pertemanan yang berdasarkan balas budi baik kepada partai politik maupun pemilik modal.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah menganalisis dan menjawab pola rekrutmen yang dilakukan terhadap kepala biro dan dinas pasca pilkada di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan tata kelola atau *good governance* atau hanya bagi-bagi jabatan. Ini menarik untuk melihat bagaimana kaitan erat antara birokrasi sebagai institusi yang harus netral dengan institusi politik yang penuh dengan kepentingan. Alasan tersebut, menjadi dasar penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah secara singkat yaitu :

“Bagaimana pola rekrutmen jabatan kepala biro dan kepala dinas pada pemerintahan provinsi Sumatera Utara pasca pemilihan Gubernur Sumatera Utara langsung 2008, apakah sesuai dengan kredibilitas dan kemampuan pejabat tersebut”.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang ingin hendak kita capai²². Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehingga menghasilkan uraian sistematis dan tidak melebar :

Pertama, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penempatan jabatan pada biro dan dinas pasca pilgubsu 2008 menganut sistem *spoil system* (pertemanan;

²² Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta:Rineka Cipta, 1993. hal.29

hal memberikan jabatan-jabatan kepada teman-teman satu partai). Atau *merit system* (pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada prestasi)²³.

Kedua, bersifat ilmiah, dimana dalam hal ini penulis ingin mengetahui dan menggambarkan pola rekrutmen dan jabatan kepala biro dan kepala dinas dilingkungan pemerintah propinsi Sumatera utara pasca pilgubsu 2008, serta deskripsi pejabatnya.

Ketiga, bersifat formal akademis yakni untuk menambah wawasan mahasiswa dalam bidang politik, khususnya menyangkut kekuatan politik. Dalam hal ini dikhususkan pada hubungan politik dan birokrasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat teoritis

Untuk mencari khasanah ilmiah dalam relasi birokrasi dan politik untuk melihat relevansi teori-teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang ada dilapangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- Sebagai masukan bagi penulis dalam usaha mengetahui produk kegiatan politik birokrasi, khususnya kajian sosial kedaerahan yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintah.
- Sebagai masukan dan sumbangan untuk pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik pada rencana kerja tahun-tahun berikutnya atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Institusi lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak dengan pengembangan studi tentang politik dan birokrasi di Indonesia.
- Bagi masyarakat, mendapatkan rangkuman data tentang bagaimana pola rekrutmen jabatan kepala biro dan kepala dinas pasca pilgubsu 2008. pada gilirannya masyarakat

²³ Dapat dilihat pada <http://www.kapanlagi.com> kamus online Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris. Diakses tanggal: 14 februari 2009.

dapat memanfaatkannya sebagai bahan yang berharga untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah sebagai bagian dari masyarakat.

1.4.3. Manfaat Akademis

- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa ilmu politik, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan kajian politik birokrasi dan analisa politik dalam konteks pemerintahan daerah.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi tentang politik birokrasi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara khususnya Departemen Ilmu Politik.

1.5. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Dalam suatu penelitian ilmiah, masalah yang akan diteliti biasanya bertolak dari teori-teori yang sudah ada, kemudian penelitian sebaiknya dilakukan tahap demi tahap secara ilmiah agar menghasilkan suatu kesimpulan yang ilmiah (*scientific research*)²⁴.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian diperlukan pedoman dasar dan berpikir yakni kerangka teori. Oleh karena itu, sebelum diadakannya suatu penelitian diperlukan penyusunan suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan sudut pandang peneliti dalam berpikir untuk menggambarkan sudut pandang peneliti dalam menyoroti masalah yang dipilih.

Kerangka teori yang menjadi landasan berpikir penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Birokrasi

²⁴ Hadari nawawi, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, Yogyakarta:Gajah Mada University Press. 1987

Dalam masyarakat awam terminologi birokrasi memiliki konotasi yang kurang baik. Istilah birokrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit-belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak efektif dan efisien, serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Moerdiono dalam tulisannya pernah mengemukakan bahwa, istilah birokrasi pada dasarnya mempunyai konotasi netral untuk menunjukkan ciri-ciri suatu organisasi besar, namun telah salah kaprah dipahami sebagai sesuatu ukuran yang buruk, walaupun Max Weber, yang dipahami sebagai pakarnya segala ulasan mengenai birokrasi, juga menunjukkan sisi positif birokrasi, namun sisi negatifnya lebih menonjol diingat orang bila mendengar istilah ini²⁵.

Berkembangnya kecenderungan anggapan masyarakat awam di Indonesia bahwa birokrasi itu berkonotasi buruk, boleh jadi turut ditumbuh-suburkan oleh tradisi penerapan birokrasi itu sendiri selama masa pemerintahan Orde Baru 1966-1998. Ketika itu birokrasi telah mengalami pemekaran fungsi dan peranan, dari sekedar instrumen teknis yang bersifat administrasi, ia berubah menjadi mesin politik yang efektif dalam upaya rekayasa masyarakat. Akibat yang tampak kemudian adalah semakin dominannya peran birokrasi dalam sistem politik orde baru. Agaknya warisan dari praktik itulah yang terus mewarnai kesan masyarakat hingga kini, meski rezim otoriter Orde Baru telah berakhir.

Birokrasi berasal dari kata *bureaucracy*, diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer²⁶. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang *fleksibel*. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat

²⁵ Dapat dilihat pada <http://www.google.com/Search/Makalah/Birokrasi/Keputusan-Pejabat-Birokrasi-dan-Dilema-Yurisdiksi-Peradilan.pdf> diakses tanggal 9 februari 2009

²⁶ Dapat dilihat pada <http://www.wikipedia.com/Search/Birokrasi.html> diakses pada tanggal 9 februari 2009

banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :

1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan
2. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.

Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (*appointed*) dan bukan dipilih (*elected*).

Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Birokrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembagian kerja dan spesialisasi kerja, prinsip hirarki, peraturan-peraturan, impersonality, kualifikasi teknis, dokumen-dokumen tertulis, dan kelangsungan kerja dalam organisasi²⁷.

1.5.1.1. Birokrasi Sebagai Mesin Politik

Max weber seorang sosiolog jerman yang kenamaan awal abad ke-19 menulis karya yang sangat berpengaruh bagi negara-negara yang berbahasa Inggris dan di negara-negara di daratan Eropa. Karya itu sampai sekarang dikenal konsep tipe ideal birokrasi. Konsep tipe ideal ini kurang dikenal tentang kritiknya terhadap seberapa jauh peran birokrasi terhadap kehidupan politik, atau bagaimana peran poitik terhadap birokrasi. Birokrasi weberian hanya

²⁷ Dapat dilihat pada <http://www.google.com/Search/defenisi/birokrasi/catatan-mr-kopetz.html> diakses tanggal 1 maret 2009

menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu secara profesional dan rasional dijalankan²⁸.

Seorang pejabat birokrat tidak seyogyanya menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya tersebut. Penetapan tujuan merupakan fungsi politik dan menjadi wewenang dari pejabat politik yang menjadi *master*nya. Oleh karena itu, birokrasi merupakan suatu mesin politik yang melaksanakan kebijaksanaan politik yang telah diambil atau dibuat oleh pejabat-pejabat politik.

Model birokrasi Weberian yang selama ini sebagai sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian, setiap pegawai atau pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi (*each individual civil servant is a cog in the machine with no personally interest*). Dalam kaitan ini maka setiap pejabat pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab publik, kecuali pada bidang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tanggung jawab publik sebagai mesin politik itu dijalankan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas pejabat birokrasi pemerintahan telah diwujudkan²⁹.

Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan kelas atau kelompok tertentu. Negara bisa mewujudkan tujuan-tujuannya melalui mesin birokrasi yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintah dalam pemikiran Weber dikenal sebagai konsep *konservatif* dari para pemikir di zamannya. Weber hanya ingin lebih meletakkan birokrasi itu sebagai mesin, daripada dilihat sebagai suatu organisasi yang mempunyai kontribusi terhadap kebulatan organik negara.

²⁸ Miftah Thoha, "Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi". Jakarta:Kencana, 2008. Hal.16 Ibid, Hal.21-22

²⁹ Ibid, Hal.21-22

Max Weber memandang birokrasi sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, suatu birokrasi yang legal rasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan (berkemampuan memisahkan urusan pribadi dengan urusan dinas).
2. *Hirarki* jabatan (perjenjangan,tingkatan) jabatan yang jelas.
3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas (adanya pembagian kerja yang jelas).
4. Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, berdasarkan suatu *diploma* (ijazah) yang diperoleh melalui ujian.
5. Mereka memiliki gaji berjenjang menurut kedudukan didalam hirarki dan hak-hak pensiun. Pejabat dapat selalu menempati posnya dalam keadaan tertentu dapat juga dihentikan.
6. Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan *senioritas* maupun keahlian.
7. Pejabatat mungkin tidak sesuai dengan posnya, maupun dengan sumber yang tersedia dalam pos tersebut.
8. Pejabat yang tunduk dalam sistem *disipliner* dan kontrol yang seragam.

Sebagai sebuah konsep pemerintahan yang paling penting, birokrasi sering dikritik karena ternyata dalam praktiknya banyak menimbulkan problem inefisiensi. Menjadi sebuah paradoks, seharusnya dengan adanya birokrasi segala urusan menjadi beres dan efisien tapi ternyata setelah diterapkan menjadi batu penghalang yang tidak lagi menjadi efisien. Ada yang mengkritik bahwa birokrasi hanya menjadi ajang politisasi yang dilakukan oleh oknum partai yang ingin meraih kekuasaan dan jabatan politis.

1.5.2. Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional³⁰. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain :

1. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
2. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara.
3. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
4. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain : kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

1.5.2.1. Kekuasaan Politik

kekuasaan adalah kemampuan seorang atau kelompok pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan³¹. Diantara banyak bentuk kekuasaan, ada satu bentuk yang paling penting yaitu kekuasaan politik dan politik dianggap *identik* dengan kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi

³⁰ Dapat dilihat pada <http://www.wikipedia.com/Search/Politik.html> diakses pada 29 januari 2009

³¹ Miriam budiarjo, Op.Cit Hal. 60

kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.

Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legeslatif dan yudikatif.

Untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan dan harus ada alat atau sarana kekuasaan agar penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik.

Ossip. K. Fleitchheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yakni³² :

1. Bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau state power), seperti lembaga-lembaga pemerintahan, presiden, dsb.
2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara.

Yang dimaksud dari penjelasan diatas ialah aliran-aliran dan asosiasi baik yang terang-terangan bersifat politik (cth: partai politik), maupun yang pada dasarnya tidak terutama menyelenggarakan kegiatan politik, tetapi pada saat-saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan.

1.5.2.2. Birokrasi Politik

Birokrasi sangat penting dalam sebuah sistem politik untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Birokrasi merupakan bagian penting dalam sistem politik yakni mendukung sistem politik.

Berkenaan dengan hal itu, penting pula dikemukakan apa yang diartikan dengan birokrasi tersebut. Birokrasi sebagai terminologi yang ada dalam kepustakaan ilmu

³² Ibid Hal. 37-38

administrasi negara dan ilmu politik senantiasa menggunakannya dalam beberapa pengertian, antara lain yang mengatakan bahwa birokrasi sebagai keseluruhan pejabat negara dibawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara dalam cabang *eksekutif*³³.

Pada jenjang *administratif*, negara memiliki ketergantungan yang kuat pada birokrasi yang menjamin kemampuan negara untuk menanggulangi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh proses-proses *diferensiasi* sebagai salah satu hasil dari *modernisasi*. Disini negara membutuhkan kemampuan para birokrat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan pemerintah³⁴.

1.5.3. Politik Birokrasi Pemerintah

Politik Birokrasi Indonesia berusaha untuk memberikan pengenalan dan pemahaman tentang konsep birokrasi, relasi antara birokrasi dengan elemen-elemen dalam sistem politik, serta kinerja dan akuntabilitas birokrasi, termasuk di dalamnya berbagai bentuk penyelewengan yang mungkin dapat dilakukan oleh birokrasi, baik dalam konteks global atau dalam kasus Indonesia. Birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan publik dan bertanggungjawab terhadap rakyat lewat lembaga legislatif kadang menjadi lembaga yang tidak terkontrol karena berbagai kelebihan dan kekuatannya. Legislatif bahkan seringkali juga harus kehilangan kendali terhadap birokrasi karena sumber dayanya yang tidak mencukupi untuk mampu mengawasi kinerja birokrasi. Untuk itulah diperlukan lembaga legislatif yang kuat yang didukung dengan seperangkat peraturan yang tegas yang akan cukup membatasi gerak birokrasi. Selain itu partisipasi masyarakat serta *voluntary sector* dalam mengawasi kinerja birokrasi menjadi suatu hal yang mutlak³⁵.

³³ P. Anthonius Sitepu, "*Sistem Politik Indonesia*", Medan:Pustaka Bangsa Press, 2006. Hal.165-166

³⁴ Gregorius Sahdan, "*Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*", Bantul:Pustaka Jogja Mandiri, 2004. Hal.206

³⁵ Dapat dilihat pada <http://www.google.com/Kesimpulan/Dari/Politik/Birokrasi/Indonesia/Birokrasi-Tunjung-Sulaksono-S.IP.html> diakses tanggal 2 februari 2009

Birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari proses dan kegiatan politik. Politik sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak Politik (*consist of people acting politically*), yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan kelompok lainnya. Birokrasi pemerintah langsung atau tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat³⁶.

Politik adalah identik dengan konflik dalam pemerintahan suatu negara. Salah satu kenyataan dasar dari kehidupan manusia bahwa orang hidup bersama-sama tidak dalam *isolasi* satu sama lainnya. Salah satu faktor yang sering kali menimbulkan perbedaan yang memunculkan konflik diantara orang dan kelompok orang adalah nilai (*value*) yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap oleh seseorang sangat penting dan sangat diharapkan (*something one thinks is very important and desirable*).

Kepentingan politik dapat muncul dari nilai bagi seseorang atau kelompok orang yang bisa diperoleh atau bisa pula hilang dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dihampir semua masyarakat, semua orang memandang bahwa tindakan pemerintah yang dijalankan melalui mesin birokrasinya adalah merupakan cara yang terbaik untuk menciptakan otorisasi dan menetapkan peraturan yang mengikat semua pihak. Birokrasi pemerintah merupakan institusi yang bisa memberikan peran politik dalam memecahkan konflik politik yang timbul diantara orang secara individu dan orang secara kelompok-kelompok.

1.5.4. Ekonomi Politik

³⁶ Martin, Albrow. "*Bureaucratic*", New York:Frederick a Praeger, 1970

1.5.4.1. Proses Timbal Balik Ekonomistik dan Politik

Sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur paling penting dalam proses hubungan timbal balik yang berlangsung, yakni cara dimana faktor politik mempengaruhi hasil ekonomi, yakni³⁷ :

1. Sistem politik membentuk sistem ekonomi, karena struktur dan kerja sistem ekonomi ditentukan pula oleh struktur dan kerja sistem politik.
2. Pandangan-pandangan politik seringkali membentuk kebijakan ekonomi, oleh sebab kebijakan ekonomi pada umumnya didikte oleh kepentingan-kepentingan politik.
3. Hubungan ekonomi itu sendiri merupakan hubungan politik, karena interaksi ekonomi, seperti interaksi politik, merupakan proses dimana aktor negara dan bukan negara melakukan/mengalami :
 - a. mengatasi konflik atau kegagalan mengatasi konflik.
 - b. bekerja sama atau kegagalan dalam mencapai tujuan bersama.

Kekuatan-kekuatan yang berbeda antara kelompok-kelompok yang bersaing mempengaruhi kebijakan ekonomi, dimana kebijaksanaan ekonomi sering kali dibentuk oleh kepentingan politik atau kebijakan yang digunakan bagi tujuan-tujuan pertahanan. Selain itu juga, dasar dari ekonomi politik adalah pasar, kekuasaan negara, dan persuasi³⁸.

1.5.5. Kepemimpinan

Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia adalah salah satu jenis kepemimpinan yaitu dibidang pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bimbingan

³⁷ Yanuar, Ikbal, "Ekonomi Politik Internasional-Implementasi Konsep dan Teori", PT. Refika Aditama. Bandung, 2007. Hal.10-11

³⁸ Ibid, Hal.13

atau tuntunan. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun³⁹.

Kepemimpinan adalah salah satu sarana dalam menggerakkan (*actualing*) dan adalah salah satu fungsi manajemen, sehingga wajar apabila kepemimpinan itu harus dipelajari oleh para pejabat pimpinan. Ada pendapat yang menyatakan kepemimpinan itu adalah sesuatu yang melekat pada diri si pemimpin, pembawaan, kepribadian, kemampuan, kesanggupan, ciri-ciri atau sifat tertentu. Kepemimpinan adalah kegiatan dari si pemimpin yang berhubungan dengan posisi/kedudukan dan jenis perilaku tertentu⁴⁰.

Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan dan sifat dari kepemimpinan. Mengikuti berbagai macam pendapat tentang teori kepemimpinan disimpulkan beberapa teori yang penting yaitu⁴¹ :

1. Teori serba sifat (*traits theory*). Teori ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi.
2. Teori lingkungan (*environmental theory*). Telah dikemukakan bahwa teori lingkungan ini *mengkonstatir* bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari pada waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi.
3. Teori pribadi dan situasi (*Personal-situational theory*). Penganut teori serba sifat dan serba situasi hanya berusaha menjelaskan kepemimpinan akibat dari seperangkat kekuatan yang tunggal.
4. Teori interaksi atau harapan (*interaction-expectation theory*). Golongan teori ini mendasarkan diri pada variabel-variabel : aksi, reaksi, interaksi dan perasaan.

³⁹ Pamudji, S, “ *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*”, Jakarta:PT. Bina Akasara, 1982. Hal.5

⁴⁰ Ibid, Hal.8

⁴¹ Ibid, Hal.147-154

5. Teori humanistik (*humanistic theory*). Teori ini mendasarkan diri pada dalil manusia karena sifatnya adalah organisma yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya adalah tersusun dan terkendali.
6. Teori tukar-menukar(*exchange theory*). Teori ini berdasarkan asumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar dalam mana anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imbalan dengan pengorbanan-pengorbanan kelompok atau anggota yang lain.

Demikian beberapa teori tentang kepemimpinan, sejarah telah membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin yang berhasil pada suatu saat, ternyata kurang berhasil bahkan mengalami kejatuhan pada saat yang lain.

1.5.6. Konsensus Politik

1.5.6.1. Tawar-Menawar (Bargaining)

Konsensus terjadi apabila tercipta kesepakatan dalam hubungan antara dua orang atau lebih. Prinsip dasar dalam konsensus adalah dibukanya kemungkinan di dalam diri setiap pihak yang berkonflik untuk mengadakan perubahan dengan bersedia menerima bagian dari pihak lawannya dalam konflik. Hal ini berarti bahwa persyaratan terpenting bagi tercapainya konsensus adalah tawar-menawar (*bargaining*) yang artinya kesediaan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengurangi tuntutan sendiri dan menerima bagian-bagian tertentu dari tuntutan pihak lain⁴².

Hambatan terbesar bagi konsensus adalah sikap yang bepegang teguh kepada pendapat yang dianut secara fanatik tanpa membuka kemungkinan bagi terjadinya perubahan terhadap pendapat tersebut. Pada hal salah satu tujuan penting dari paham demokrasi adalah menciptakan masyarakat dimana anggota-anggota masyarakat dapat hidup berdampingan

⁴² Maswadi, Rauf, "*Konsensus dan Konflik Politik*". Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Hal.14-15

secara damai karena mereka mampu menyelesaikan konflik diantara mereka secara damai/persuasif.

Ada berbagai kemungkinan kompromi yang bisa dicapai dalam mencari kesepakatan.

Ada beberapa model konsensus⁴³ :

1. Konsensus yang merupakan gabungan dari butir-butir pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
2. Mirip model pertama, bedanya terletak pada disepakatinya pendapat dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik sebagai konsensus.
3. Konsensus yang dibentuk dari pendapat-pendapat pihak lain, bukan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
4. Konsensus gabungan, model ini merupakan gabungan dari beberapa model konsensus yang dibahas di atas.

Model-model konsensus diatas didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

1.5.7. Rekrutmen Politik

1.5.7.1. Pengertian rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Salah satu

⁴³ Ibid, Hal.16

tugas pokok dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legeslatif (DPR/DPRD), dan eksekutif (presiden, Gubernur, Bupati, dst).

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Dalam rekrutmen ada dua cara khusus yang dijadikan sebagai hal terpenting dalam perekrutan yaitu seleksi dan pemilihan.

Gabriel Almond mengemukakan dalam bukunya Arifin Rahman pada sistem politik indonesia ada 5 sistem rekrutmen politik yakni :

1. Sistem terbuka yaitu sistem rekrutmen yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada semua orang untuk bergabung dengan partai politik.
2. Sistem tertutup merupakan sistem rekrutmen politik yang dilakukan dengan sistem seleksi dengan melihat karakteristik tertentu yang ada pada individu ataupun masyarakat seperti kelompok suku, agama, dan ras.
3. Sistem rotasi, sistem ini terbagi dalam 2 pola rekrutmen politik antara lain yaitu rekrutmen yang didasarkan atas masa jabatan yang sudah ditentukan misalnya jabatan pada tingkat legeslatif dan eksekutif. Sedangkan sistem rotasi pilih kasih lebih cenderung pada hal rekrutmen politik berdasarkan kepentingan dengan kata lain hak preogratif elit partai.
4. Sistem kudeta adalah bentuk rekrutmen politik yang dilakukan secara paksaan ataupun kekerasan untuk dapat bergabung dalam suatu organisasi kepartaian, cenderung pada partai sistem komunis.
5. Sistem patronase, yaitu suatu bentuk rekrutmen politik yang dilakukan dengan cara penyuaipan ataupun nepotisme akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik umumnya dan pemerintah khususnya⁴⁴. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen sangat penting bagi keberlangsungan sistem politik karena tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam⁴⁵.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian diatas, maka sistem rekrutmen politik dibedakan atas rekrutmen terhadap kader-kader anggota baru yang dianggap mampu berperan dalam sistem politik dan rekrutmen yang dilakukan untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

1.5.7.2. Bentuk-Bentuk Rekrutmen Politik

Bentuk-bentuk rekrutmen politik memiliki keragaman yang bergantung pada nilai-nilai politik yang dianut oleh elit politik. Beberapa bentuk yang sering dianggap penting misalnya sistem patronase, sistem perkawanan (spoil system), dan sistem koopsi (cooption system)⁴⁶.

a. Sistem Patronase

Sistem patronase adalah sebuah bentuk rekrutmen atas orang-orang tertentu yang dianggap cocok dengan keinginan elit politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik atau struktur kekuasaan lainnya. Dalam bentuk ini, orang-orang yang dapat masuk kedalam struktur kekuasaan sangat ditentukan oleh faktor keinginan dan kecocokan dalam persamaan kepentingan politik maupun dalam hal kemampuannya.

⁴⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka, 1992, Hal.118

⁴⁵ Ibid, hal. 118

⁴⁶ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, Hal.19

Dengan mengangkat orang-orang yang cocok ini kan mudah bagi elit politik untuk membangun basis kekuatannya dan mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik dan dapat juga dijadikan sarana untuk melihat besarnya dukungan⁴⁷. Selain faktor keinginan dan kecocokan yang ditentukan oleh elit politik, dalam sistem patronase kedudukan politik atau kenaikan posisi sebenarnya juga dapat dibeli dari individu-individu yang mencari jabatan. Cara yang dilakukan biasanya dengan menunjukkan loyalitas kepada elit politiknya, yang dengan loyalitas tersebut mereka mengharapkan dapat ditarik ke dalam struktur kekuasaan atau ke posisi yang lebih tinggi.

b. Sistem Perkawanan (Spoil System)

Sistem perkawanan merupakan suatu bentuk yang lebih paling didasarkan pada kriteria atau faktor imbalan jasa. Kedudukan yang diberikan kepada orang-orang ini sebenarnya merupakan penghargaan dari elit politik, dimana dengan kedudukan itu diharapkan mereka akan lebih bersimpati pada elit partai dan tidak akan merongrong tujuan maupun tindakan elit tersebut. Dengan cara ini secara timbal balik antara pihak elit dengan orang-orang yang diberi kedudukan tersebut akan diikat oleh suatu hubungan mutualisme yang berbentuk imbalan jasa. Mereka akan direkrut ke dalam posisi-posisi utama dan strategis ini sangat ditentukan oleh faktor keinginan dan kecocokan dari elit partai dan karena sistem ini sangat dekat dengan sistem prekrutan patronase.

c. Sistem Koopsi (cooption System)

Sistem koopsi merupakan suatu bentuk perekrutan orang-orang diluar kelompok atau organisasi, yang karena keahliannya mereka diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur kekuasaan atau birokrasi politik. Proses yang dilakukan dalam sistem ini lebih terbatas sifatnya daripada bentuk rekrutmen sebelumnya yaitu terbatas

⁴⁷ Ibid., Hal. 180-182

dalam suatu lembaga atau suatu organisasi tertentu. Misalnya seorang pimpinan partai merekrut para aktivis mahasiswa dalam partainya atau menempatkan seorang pengusaha dalam jabatan tertentu di partai politik⁴⁸.

1.5.7.3. Pertimbangan Dalam Rekrutmen Politik

Dalam mencalonkan seseorang pemimpin yang akan diajukan untuk menduduki jabatan tertentu ada hal yang harus di perhatikan atau dinilai dari calon tersebut. Penilaian ini merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan calon yang berkualitas yang memiliki visi dan misi yang sama.

Menurut Sergiovanni dan Corbally (1986) ada tiga syarat untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu⁴⁹ :

1. Popularitas, yakni dikenal atau setidaknya calon dari masyarakat.
2. Akseptabilitas, penerimaan masyarakat terhadap seorang tokoh masyarakat atau seorang pegawai.
3. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat ataupun kepentingan umum.

1.5.8. Intervensi Politik

Semenjak era reformasi kepemimpinan birokrasi pemerintah daerah harus dijabat kepala daerah yang pencalonannya dari partai politik. Dengan demikian, birokrasi pemerintah daerah dipimpin oleh pejabat politik dari partai politik tertentu yang memperoleh mandat dari

⁴⁸ Kesimpulan dari ulasan tentang cooption system menurut Rush dan Althof, dalam Ibid. Hal.183-184

⁴⁹ Riswanda Imawan, *Catatan Dari Kaki Merapi*, Pusataka Pelajar: Jakarta, 1996. Hal.30

rakyat. Keadaan seperti ini menjadikan aspirasi politik dari partai politik kepala daerah terbawa kedalam kepemimpinannya di pemerintahan daerah⁵⁰.

Keterikatan kepala daerah dengan partai politik yang mencalonkannya seringkali berujung dengan komitmen kepala daerah untuk membantu pendanaan dan sebagainya kepada partai politik tersebut. Selain pejabat politik yang memimpin birokrasi pemerintahan menjadi penyebab berkurangnya diskresi pejabat birokrasi, semua kepala daerah, sekda, kabi, kadis, dll, sekarang tidak ada yang berani berimprovisasi diruang diskresinya.

1.5.9. Relasi Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992)⁵¹.

Kekuasaan dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu kekuasaan yang bersifat positif dan negatif.

1. Kekuasaan bersifat positif, merupakan Kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental.
2. Kekuasaan bersifat Negatif, Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok

⁵⁰ Miftah, Thoha, Op.Cit., Hal.77

⁵¹ Dapat dilihat pada <http://www.wikipedia.com/Search/Kekuasaan.html> diakses tanggal 15 februari 2009

untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental.

Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.

Bagi para anarko-primitivis, peradaban adalah sebuah konteks pelipatgandaan relasi kekuasaan. Beberapa relasi kekuasaan yang paling mendasar memang terdapat juga di tengah masyarakat primitif dan atas alasan ini jugalah mengapa anarko-primitivis tidak berupaya untuk mereplika atau kembali pada bentuk masyarakat tersebut tetapi dalam peradabanlah berbagai relasi kekuasaan menjadi sangat berkembang dan begitu meresap dalam seluruh aspek praktis kehidupan manusia dan dalam relasi antara manusia dengan biosfernya⁵².

Berbagai ideologi seperti Marxisme, anarkisme klasik dan feminisme menentang beberapa aspek tertentu dari peradaban tetapi hanya anarko-primitivisme yang menentang peradaban itu sendiri, konteks yang mana di dalamnya seluruh bentuk perjuangan ideologis tersebut terengkuh di dalamnya. Anarko-primitivisme melibatkan elemen-elemen dari berbagai arus oposisi kesadaran ekologi, anti-otoritarianisme anarkis, kritik dari feminis, ide-ide Situationist International, teori-teori kerja, kritik teknologi tetapi melangkah melampaui bentuk oposisi tunggal terhadap kekuasaan, dengan menolak seluruh bentuk struktur relasi kekuasaan.

⁵² Dapat dilihat pada <http://www.wikipedia.com/Search/Anarko/Primitivisme.html> diakses tanggal 15 februari 2009

Kekuasaan, pada dasarnya terbentuk karena adanya tarik menarik antara peran negara di satu sisi dengan partisipasi rakyat di sisi lain, dan berlangsung dalam sistem politik. Dalam kerangka itu, Moughtin (1992) mengungkap tipologi sistem politik, yang terdiri dari 4 sistem; anarki, demokrasi partisipasi, demokrasi perwakilan, dan totaliter. Moughtin selanjutnya menjelaskan tingkat dan derajat partisipasi rakyat. Tingkat partisipasi rakyat paling tinggi (masyarakat madani) berada dalam pemerintahan demokrasi dengan kontrol sepenuhnya di tangan warga negara. Sementara pada negara otoriter, tidak ada partisipasi, yang terjadi adalah strategi manipulasi untuk kelanggengan kekuasaan⁵³.

Tarik menarik antara peran negara yang diwakili pemerintah dengan partisipasi masyarakat, pada dasarnya berlangsung dalam interaksi yang dialektis sehingga secara keseluruhan membentuk negara itu sendiri. Dalam konteks ini, van Langenberg (1996) menyatakan bahwa, sifat negara (tunggal) adalah hasil interaksi dari struktur berlapis, yaitu kekuasaan, legitimasi, akumulasi, dan budaya-tempat negara dan masyarakat berinteraksi secara dialektis. Kekuasaan, seperti dijelaskan Gramsci, ialah berarti perluasan dan pelestarian kepatuhan aktif dari kelompok-kelompok subordinat yang terkooptasi lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik. Legitimasi, berarti kepercayaan, keabsahan, dan pengakuan yang diberikan rakyat kepada pemerintah (sistem negara) nya.

Akumulasinya, ialah proses penumpukan kekuasaan sistem negara melalui proses-proses dan transaksi budaya yang berlangsung antara negara dengan masyarakat dan antara kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Mengadaptasi teori dialektis sistem negaramasyarakat itu, telaah ini meninjau relasi kekuasaan dan arsitektur berdasarkan aspek-aspek berikut:

1. Orientasi kekuasaan, ideologi, orientasi kesejarahan, dan strategi memperoleh legitimasi.

⁵³ Dapat dilihat pada <http://www.google.com/Relasi/Kekuasaan/dan/Arsitektur/Dari/Dekonstruksi/ke/Sustainable/city.pdf> diakses tanggal 16 maret 2009

2. Sistem produksi sosial-budaya, ekonomi, teknologi, dan bahasa. Pemilahan itu didukung oleh asumsi dari van Langenberg pula, bahwa negara, secara simultan, ialah sebuah entitas, arena, dan ide. Segi fungsional dan ideal dari negara ini saling bergantung dan berjaln rapat. Hasil keseluruhannya terdiri dari empat arena utama; sistem negara, kelompok masyarakat, dunia swasta, dan wilayah publik, serta empat proses; dominasi, hegemoni, produksi, dan pasar berlangsung.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada⁵⁴.

Tujuan penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta, sifat serta hubungan antara peristiwa yang diselidiki. Penelitian kualitatif tidak terlalu menitikberatkan pada kedalaman data, yang terpenting dapat merekam sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas dimana penelitian kualitatif sebaiknya diikuti oleh penelitian kualitatif agar dapat memberikan kenyataan yang lebih akurat dalam kegiatan prediksi dan kontrol⁵⁵.

⁵⁴Mardalis, "*Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*", Jakarta:Bumi Aksara, 1995. Hal.26

⁵⁵ Husaini, Usman, "*Metode Penelitian Sosial*", Jakarta:Bumi Aksara, 1996. Hal.93

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data baik informasi, keterangan atau fakta yang diperlukan, penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- *Field Research Methods*, yakni pengamatan baik dengan dialog atau terjun langsung ke lokasi dengan cara wawancara tentang masalah yang diteliti dengan responden yang memiliki pengetahuan tentang masalah penelitian.
- *Library Research Methods*, yakni mempelajari berbagai sumber yang berasal dari buku, jurnal, atau surat kabar.
- Dokumentasi, yakni mencari data yang telah tersedia dilokasi penelitian baik berupa peraturan pemerintah, ringkasan riset atau hasil survey yang dilakukan berhubungan dengan masalah penelitian.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada upaya mencari pemahaman (*understanding*)⁵⁶.

Dalam kerangka penelitian kualitatif untuk mendeskriptifkan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya dikemukakan dengan berpegang pada prinsip emik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran dan *evaluatif*⁵⁷.

⁵⁶ Lexy, Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung:Remaja Karya, 1990. Hal.108

⁵⁷ Burhan, Bungin, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta:Raja Grafindo, 2001. Hal.187

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini direncanakan terdiri dari beberapa bab, kemudian tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dan pengantar dari keseluruhan skripsi. Dalam bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, ruang lingkup, metodologi penelitian, lokasi penelitian, analisa data, serta sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI LOKASI.

Bab ini berisi gambaran secara umum deskripsi lokasi penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan sejarah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, prinsip good governance, visi dan misi arti logo Pemprovsum, Pemprovsum dibawah kepemimpinan H Syamsul Arifin SE dan struktur pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III : ANALISIS DAN KAJIAN DATA

Bab ini berisikan data yang di peroleh dari penelitian dan analisa yang dilakukan penulis mengenai mekanisme pola rekrutmen kepala biro dan kepala dinas pada pemerintahan provinsi sumut pasca pilgubsum 2008.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh hasil penelitian serta berisi saran membangun untuk perbaikan di masa mendatang yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI

2.1. Sejarah Singkat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Ibu kotanya waktu itu belum di Medan, melainkan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Berdasarkan penemuan arkeologi, Sumatera Utara diketahui dihuni sejak zaman *Mesolitikum*. Penghuninya disebut sebagai orang *Austro Melanesoid*, banyak mendiami daerah muara sungai. Pada tahun 2000 SM, Sumatera Utara mulai dihuni oleh orang *Proto Melayu* dan kemudian dihuni pula oleh orang *Deutro Melayu* yang berasal dari daerah bagian selatan Cina⁵⁸.

Pada awal *tarikh* Masehi, penghuni Sumatera Utara sudah menjalin hubungan dagang dengan orang-orang dari India dan Cina. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pemerintahan dengan sistem Kerajaan di Sumatera Utara muncul pada abad 15, yaitu dengan munculnya Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Batangiu. Pada abad 16, di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. Sementara itu, di daerah pesisir timur Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru.

Pengaruh Aceh ke Sumatera Utara masuk pada abad 17. Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut oleh Siak. Pada abad 19, pengaruh Belanda mulai masuk. Tanggal 1 Februari 1859, Siak menandatangani perjanjian penting dengan Belanda. Isinya adalah pengakuan dari penguasa Siak bahwa daerahnya termasuk dalam kekuasaan Belanda. Tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga dan Omstreken, Angkola dan Sipirok, Bataklanden, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di

⁵⁸ www.sejarahbangsa indonesia.co.cc

Medan, terdiri atas empat daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan.

Pada tanggal 13 Maret 1942, Tentara Jepang memasuki Medan. Mereka kemudian menduduki Mesjid Raya untuk dijadikan benteng. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang dapat menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara. Dua hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di awal kemerdekaan ini, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera. Seperti diuraikan di atas, pada tanggal 15 April 1948, Sumatera Utara terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

2.1.1. Terbentuknya Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Dr. F. Lumbantobing diangkat sebagai residen Tapanuli. Selanjutnya dilakukan pembentukan KNI di seluruh wilayah yang disertai dengan pembentukan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Dalam memperingati tiga bulan proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Oktober 1945, di Tarutung dilakukan rapat umum yang dihariri oleh seluruh rakyat setempat. Dalam kesempatan itu, rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948 pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan dan pada tanggal 15⁵⁹. Awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Mei 1949 Nomor 22/Pem/PDRI jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan, selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 dibentuk Provinsi Aceh dan

⁵⁹ Dapat dilihat pada <http://www.pusdatinkomtel-depdagri.go.id/sejarah/sumatera/utara.html> diakses pada tanggal 20 mei 2009.

Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur yang kemudian dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara.

Pada era RIS, identitas Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk dalam Negara Sumatera Timur. Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari bentuk RIS ke NKRI, provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli dengan Medan ditetapkan sebagai Ibukotanya. Gubernur definitif pertamanya adalah A. Hakim yang kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Mr. S.M. Amin. Pada tahun 1956, Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi, dengan demikian wilayah Sumatera Utara hanya mencakup wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Kondisi wilayah ini tetap sampai sekarang. Pada tahun 1956 ini SM. Amin diganti oleh St. Kumala Pontas yang menjabat gubernur sampai tahun 1960.

Tanggal 7 Desember 1956 diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang intinya Provinsi Sumatera Utara wilayahnya dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai Daerah Otonomi Provinsi Aceh.

Sampai awal terbentuknya rezim Orde Baru, Sumatera Utara masih disibukan dengan konflik-konflik baik vertikal ataupun horizontal. Akibat konflik tersebut, empat gubernur berikutnya tidak bisa melakukan pembangunan. Mereka adalah Raja Junjungan Lubis (1960-1963), Eny Karim (1963-1963), Ulung Sitepu (1963-1965), dan P.R. Telaumbanua (1965-1967)⁶⁰. Pembangunan daerah baru bisa dilakukan di era Orde Baru. Gubernur yang menjabat pertama di era Orde Baru adalah Brigjen Marah Halim Harahap (1967-1978). Gubernur berikutnya adalah Mayjen E.W.P. Tambunan (1978-1983), Mayjen Kaharuddin

⁶⁰ Dapat dilihat pada <http://www.sejarahbangsaindonesia.co.cc/sejarah/sumatera/utara.html> diakses pada tanggal 19 mei 2009.

Nasution (1983-1988), Mayjen Raja Inal Siregar (1988-1998), Mayjen Tengku Rizal Nurdin (1998-2005), Rudolf Pardede (2005-2008), dan Syamsul Arifin (2008-2013).

2.1.2. Arti Logo Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara⁶¹

- Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, adalah lambang kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme dan komunisme.
- Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
- Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan Sumatera Utara, melambangkan daerah yang indah permai, mashur dengan kekakayaan alamnya yang berlimpah-limpah.
- Tujuh belas, kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan RI.
- Tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta dan pembela keadilan.
- Bukit barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan, kegotong-royongan yang dinamis.
- Motto Daerah , adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.

⁶¹ Diperoleh dari Dinas Informasi dan Komunikasi PemprovSU

2.1.3. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950. Provinsi Sumatera Utara dibentuk meliputi sebagian Aceh. Tahun 1956, Aceh dipisahkan menjadi Daerah Otonom dari Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Dengan dimekarkannya kembali Kabupaten Tapanuli Selatan, maka provinsi ini memiliki kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas yang beribukota di Sibuhuan dengan dasar hukum UURI No. 38/2007 dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribukota di Gunung Tua dengan dasar hukum UURI No. 37/2007. Pulau Nias juga dimekarkan, yaitu dengan membentuk Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli.

Tabel 2.1 : Daftar Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

NO.	Kabupaten/Kota	Ibukota
1.	Kabupaten Asahan	Kisaran
2.	Kabupaten Batubara	Lima Puluh
3.	Kabupaten Dairi	Sidikalang
4.	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
5.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
6.	Kabupaten Karo	Kabanjahe
7.	Kabupaten Labuhanbatu	Rantau Prapat
8.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang
9.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan
10.	Kabupaten Langkat	Stabat
11.	Kabupaten Mandailing Natal	Penyabungan
12.	Kabupaten Nias	Gunung Sitoli
13.	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
14.	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
15.	Kabupaten Nias Utara	Lotu
16.	Kabupaten Padang Lawas	Sihubuan

17.	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
18.	Kabupaten Pakpak Barat	Salak
19.	Kabupaten Samsir	Pangururan
20.	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
21.	Kabupaten Simalungun	Raya
22.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
23.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
24.	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
25.	Kabupaten Toba Samsir	Balige
26.	Kota Binjai	Binjai Kota
27.	Kota Gunung Sitoli	Gunung Sitoli Kota
28.	Kota Medan	Medan
29.	Kota Padang Sidempuan	Padang Sidempuan
30.	Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar
31.	Kota Sibolga	Sibolga
32.	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai
33.	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi

Sumber BKD Pemprov

2.2. 10 Prinsip Good Governance

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menerapkan 10 prinsip good governance guna mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik pada pemerintahan Gubernur H. Syamsul Arifin SE yaitu :

1. **AKUNTABILITAS** : Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. **PENGAWASAN** : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. **DAYA TANGGAP** : Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. **PROFESIONALISME** : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. **EFISIENSI & EFEKTIVITAS** : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. **TRANSPARANSI** : Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. **KESETARAAN** : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. **WAWASAN KE DEPAN** : Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. **PARTISIPASI** : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. PENEGAKAN HUKUM : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2.2.1. Visi dan Misi

Guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur H. Syamsul Arifin SE tidak hanya memiliki prinsip good governance tetapi juga didukung oleh visi dan misi yang di emban guna mewujudkan hubungan yang baik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat yaitu:

VISI

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERIMAN, MAJU, MANDIRI, MAPAN, DAN BERKEADILAN DI DALAM KEBHINEKAAN YANG DIDUKUNG OLEH TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, konsisten dan konsekuen, menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam bingkai keluarga besar masyarakat Sumatera Utara yang harmonis.
2. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta menggunakan akal sehat, dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan cirri identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk karena pandai menghargai adat.

3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.
4. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak, tanpa adanya tingkat kesenjangan yang signifikan.
5. Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan didalam kebhinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama secara proporsional dalam lingkup masyarakat yang merasa dipinggirkan, dilupakan dan ditinggalkan.
6. Tata pemerintahan yang baik atau good governance menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dibuatlah Misi seperti berikut ini :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka menghilangkannya sama sekali dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa aman masyarakat.
4. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan kesenjangan wilayah melalui kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dan kerjasama Regional dan Internasional.
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah, termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, pariwisata serta sektor unggulan lainnya, dengan cara investasi dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
6. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya dapat terlihat dari antara lain, komposisi pejabat di pemerintahan daerah yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Sumatera Utara yang serasi.

2.2.2. Program Prioritas

Gubernur H. Syamsul Arifin SE juga memiliki program prioritas yang harus diutamakan untuk dilaksanakan pada masa periode kepemimpinannya yaitu :

1. Bidang Hukum

Program penegakan hukum di bidang kehutanan ditujukan untuk menangani pencurian kayu (Illegal logging) dan kebakaran hutan dan telah dibentuk tim Operasional Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Propinsi Sumatera Utara yang melibatkan beberapa instansi terkait yang akan di fokuskan pengamanan hutan pada kawasan hutan produksi, dan hutan lindung

2. Ekonomi

- a. Peningkatan ketahanan pangan
- b. Pengembangan Agribisnis
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan
- d. Peningkatan aksesibilitas objek wisata, promosi dan pemasaran pariwisata serta pelestarian budaya
- e. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Prasarana dan Saran
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
- g. Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Masyarakat Pesisir

3. Bidang Pendidikan

- a. Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar, menengah dan Kejuruan.
- b. Dukungan untuk mempertahankan kelangsungan / partisipasi Sekolah Dasar (SD/MI) dan lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTs) melalui Program Basic Education Project (BEP).

4. Bidang Sosial Budaya

- a. Pembinaan Dan Dukungan Pembangunan Sarana/Prasarana Kesehatan Khususnya Rumah Sakit Kab./Kota Dan Puskesmas Pada Jalan Lintas Propinsi.
 - b. Penyediaan dana pembelian obat oleh kabupaten/kota (propinsi hanya mendukung).
5. Bidang Pembangunan Daerah
- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Se Sumatera di Propinsi Sumatera Utara dengan kegiatan Pengintegrasian jaringan ke dinas-dinas Pemerintah Propinsi Sum.Utara dan Pemerintah Kab./Kota.
 - c. Penerapan Sistem Informasi pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah (SIMLAPDA) sesuai dengan PP 56 Tahun 2001 dan Kab./Kota agar mengalokasikan dana dari APBD Kab./Kota
 - d. Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah
 - e. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs),
6. Pengembangan Kerjasama Luar Negeri
- a. Pengembangan Sister Province berupa peningkatan kegiatan swasta melalui Propinsi bersaudara untuk menjalin hubungan dagang dengan mitra diluar Negeri.
 - b. Asia Urbs Programme merupakan program kerjasama Uni Eropa dengan Negara-negara di kawasa Asia, berupa dukungan Proyek-proyek pembangunan berjangka 2 (dua) tahun atau studi-studi berjangka 6 (enam) bulan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi penghidupan dan lingkungan bagi penduduk perkotaan yang difokuskan pada manajemen

perkotaan, pengembangan sosial ekonomi perkotaan, lingkungan perkotaan dan infrastrukturnya perkotaan.

- c. Bantuan Luar Negeri Pemerintah Jepang disalurkan melalui Deplu/Konjen Jepang dalam bentuk hibah kepada Pemerintah seperti Perlengkapan RS Kabanjahe dan Masyarakat melalui LSM berupa Grass Root Program.
- d. JICA memberikan bantuan teknik/Technical Assisten seperti studi-studi yang diprioritaskan pada pembangunan sosial dan penurunan tingkat kemiskinan, dukungan bagi pengembangan pola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, reformasi struktur perekonomian dalam rangka pemulihan kesetabilan ekonomi, peningkatan infrastruktur industri untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap lingkungan dan pengiriman tenaga ahli, pelatihan.

2.2.3. Gubernur Sumatera Utara

Tabel 2.2 : Daftar Gubernur Sumatera Utara

No.	Nama	Dari	Sampai	Keterangan
1.	Mr. SM. Amin	18 Juni 1948	1 Desember 1948	
2.	Ferdinand Lumban Tobing	1 Desember 1948	31 Januari 1950	
3.	Sarimin Reksodiharjo	14 Agustus 1950	25 Januari 1951	
4.	Abdul Hakim	25 Januari 1951	23 Oktober 1953	
5.	Mr. SM. Amin	23 Oktober 1953	12 Maret 1956	
6.	Sutan Kumala Pontas	18 Maret 1956	1 April 1960	
7.	Raja Djundjungan Lubis	1 April 1960	5 April 1963	
8.	Eny Karim Ulung Sitepu	8 April 1963	15 Juli 1963	
9.	Ulung Sitepu	15 Juli 1963	16 November 1965	
10.	PR. Telaumbanua	16 November 1965	31 Maret 1967	
11.	Marah Halim Harahap	31 Maret 1967	12 Juni 1978	

12.	Edward Waldemar Pahala Tambunan	12 Juni 1978	13 Juni 1983	
13.	Kaharudin Nasution	13 Juni 1983	13 Juni 1988	
14.	Raja Inal Siregar	13 Juni 1988	15 Juni 1998	
15.	Tengku Rizal Nurdin	15 Juni 1998	5 September 2005	Meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat terbang pada 05-09-2005
16.	Rudolf Pardede	10 Maret 2006	16 Juni 2008	Pelaksana Tugas Gubernur dari 5-09-2005 sampai 10-03-2006
17.	Syamsul Arifin	16 Juni 2008	sekarang	

Sumber : BKD Pemprov Sumut

2.3. Pemprov di Bawah Kepemimpinan Gubernur Syamsul Arifin SE

H. Syamsul Arifin SE lahir di medan, 25 september 1952, dilantik sebagai gubernur Sumatera Utara yang ke 17 pada tanggal 16 juni 2008. Patut diingat bahwa ia adalah Bupati pertama dari kalangan swasta, sehingga menjadi inspirasi bagi kalangan non pemerintah untuk menjadi kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagaimana telah terjadi di banyak daerah dewasa ini. mencermati gaya kepemimpinannya di tengah-tengah kepemimpinan formal yang dilakoninya, agaknya tidak banyak teori yang bisa di aplikasikan dengan gaya kepemimpinan H. Syamsul Arifin kecuali sebuah teori yang mengurai tentang Kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Gaya inilah agaknya yang penulis asumsikan cocok untuk melihat konfigurasi gaya kepemimpinan H Syamsul Arifin⁶².

Dengan gaya kepemimpinan seperti itulah diramalkan H Syamsul Arifin akan bekerja untuk membawa masyarakat Sumatera Utara memenuhi visi misinya yakni Tidak Sakit, Tidak Lapar, Tidak Bodoh dan Taat Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia paham betul bahwa

⁶² Harian Waspada Edisi 15 Oktober 2008, Sakhyani Asmara, Medan, *Memahami Gaya Kepemimpinan Syamsul*.

untuk membuat orang menjadi sehat, membuat orang menjadi kenyang, membuat orang menjadi pintar dan membuat orang menjadi taqwa, bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dikerjakan melainkan suatu pekerjaan yang perlu penanganan jitu, perencanaan yang matang serta pelibatan sumber daya yang handal.

Tuntutan program dalam masa pemerintahan Gubernur Sumatera Utara, H Syamsul Arifin SE, dan Wakil Gubernur Gatot Pujonugroho ST mempunyai gaya dan trik tersendiri. Karenanya diharapkan seluruh warga masyarakat Sumut mendukung program yang dicanangkan Gubernur H Syamsul Arifin SE bersama Wagub Gatot Pujonugroho ST. Sebab bagaimanapun program-program yang telah dirancang dan mulai dicanangkan dengan baik itu tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari aparatur di bawahnya serta seluruh stakeholder yang ada. Selain itu masyarakat Sumut juga diminta jangan buru-buru menilai bahwa program yang diusung H Syamsul Arifin SE belum berjalan maksimal. Tetapi biarlah bekerja dulu untuk melakukan tahapan dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabilitas, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agar program tersebut berjalan dengan baik, H Syamsul Arifin SE sering membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berkomunikasi serta mendengar masukan yang konstruktif demi kemajuan Sumut. Gubernur juga harus mendengar kritikan dan saran yang konstruktif dari berbagai kalangan demi kemajuan Sumut.

H Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugroho terlambat dalam menentukan pejabat dalam jabatan struktural. menunjukkan H Syamsul Arifin SE, sedang melakukan observasi dan meluncurkan kehati-hatiannya, terutama untuk menempatkan seorang aparat, harus sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan maupun pengalaman yang dibarengi loyalitas dan tidak tercela, adalah harga mati yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Terutama bila menyangkut sumber daya (SDM) yang takut pada Tuhan, dan profesional dalam pendidikan serta berpengalaman yang dibarengi ketekunan dan keuletan.

Contoh lain juga dapat dilihat bahwa pemprov sumut juga akan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. karenanya, para pimpinan unit tersebut harus menandatangani kontrak kinerja sebagai bentuk komitmen mereka terhadap tugas yang diembannya. Kontrak kinerja itu dimaksudkan untuk mengajak setiap unit kerja dan pimpinan unit untuk memiliki pola pikir dan tindakan yang sama dan lebih mengutamakan prinsip good governance, melaksanakan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui program-program yang ada di unit kerja tersebut.

Sejumlah prestasi berhasil ditorehkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2008. Prestasi yang diraih dalam rangkaian menjalankan lima agenda besar pembangunan Sumatera Utara tersebut diharapkan menjadi motivasi serta pemacu agar kinerja Pemprovsu bisa lebih baik lagi di tahun 2009. Prestasi besar masyarakat masyarakat sumut yang mendapat respon pemerintah pusat dengan memberikan penghargaan tersebut yakni penghargaan ketahanan pangan, terbaik II nasional Gerakan pramuka, penghargaan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penghargaan tentang penghapusan trafficking⁶³.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga cenderung membaik dan hingga saat ini masih di atas rata-rata nasional, yaitu hingga triwulan III tahun 2008 mencapai 6,7 persen, pendapatan domestik regional brutto (PDRB) Rp 99 triliun dengan pendapatan perkapita Rp 7,9 juta dan indeks pembangunan manusia (IPM) 72,00. Pemerintah provinsi Sumatera Utara juga berhasil menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2009 lebih awal yaitu pada pertengahan Desember 2008 sebesar Rp 36 triliun yang belum pernah terjadi selama sebelas tahun terakhir. Hal ini diharapkan dapat memberi stimulan bagi pergerakan ekonomi 2009.

⁶³ Harian waspada Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Senin 5 januari 2009

Berbagai prestasi dan keberhasilan ini diharapkan menjadi pemicu optimisme dalam menyongsong tahun 2009, ditambah modal sosial Sumatera Utara yang kondusif dan harmonis. Sehingga walaupun krisis ekonomi global membayangi, namun Sumatera Utara memiliki peluang dan harapan besar untuk tetap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Sementara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berhasil melaksanakan lima agenda besar pembangunan sepanjang tahun 2008.

Untuk melaksanakan agenda pertama, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat terobosan penandatanganan Pakta Integritas Anti korupsi bagi seluruh bupati/walikota se-Sumatera Utara. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan tes narkoba bagi seluruh aparatur, demi terciptanya aparatur yang bebas dari narkoba. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memerangi narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Peningkatan kompetensi aparatur juga dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan disiplin aparatur, diantaranya dengan inspeksi mendadak keberbagai instansi guna mengetahui langsung tingkat kehadiran pegawai.

Agenda pertama, menciptakan Good Governance dan mendorong penegakan hukum :

1. Pembinaan aparatur pemerintah menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa.
2. Melaksanakan sistem pemerintahan yang transparan dan tanggap.
3. Revitalisasi proses desentralisasi provinsi, kabupaten/kota dan otonomi daerah.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan taat hukum.
5. Penanggulangan kriminalitas dan premanisme serta mendukung penghapusan terorisme.
6. Peningkatan kemampuan penanggulangan keamanan ketertiban dan penanggulangan bencana.
7. Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.

Selain itu, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, satuan kerja perangkat daerah (SPKD) PemprovSU diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan mingguan

instansi kepada Gubernur melalui Sekdaprovsu lewat surat elektronik (e-mail) meliputi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD, penyusunan pelaporan semesteran, penyusunan laporan akhir tahun.

Agenda kedua, pembinaan SDM yang berkualitas.

1. Pembinaan kualitas berkehidupan beragama.
2. Pembinaan pendidikan yang berkualitas.
3. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Peningkatan kualitas kesehatan.
5. Pembangunan kependudukan, keluarga kecil berkualitas, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.
6. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berdirinya daerah ini, berhasil menetapkan anggaran 20 persen pada APBD 2009. Persentase anggaran pendidikan sebesar 20 persen ini sesuai dengan amanah undang-undang, serta memenuhi aspirasi masyarakat. Peningkatan persentase anggaran dari total APBD sebesar Rp 3,6 triliun itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru. Dana yang cukup besar itu diharapkan dapat menggratiskan biaya pendidikan untuk SD, SMP, SMA/SMK negeri bagi keluarga miskin.

Dibidang kesehatan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam rapat kerja bersama telah menyepakati peningkatan dana anggaran untuk kesehatan secara bertahap melalui pemberian bantuan guna mendukung pelayanan kesehatan gratis di semua puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu). Pemprovsu juga mendorong pemkab/pemko melakukan koordinasi pendataan penduduk miskin yang masuk program

jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), termasuk mendorong pemkab/pemko mengalokasikan dana penunjang gizi berimbang, serta pencegahan gizi buruk.

Sedangkan di sektor ketenagakerjaan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum provinsi (UMP), serta pelaksanaan pembayaran tunjangan untuk hari raya keagamaan. Untuk UMP tahun 2009, juga telah ditetapkan besarnya, di mana mengalami kenaikan 10 persen dibanding dengan UMP tahun sebelumnya. Kebijakan ini guna menjawab keresahan para pekerja yang sebelumnya memperkirakan kenaikan tidak lebih dari 6 persen.

Agenda ketiga, membina masyarakat yang harmonis dengan rasa keadilan, kesetaraan dan rasa persatuan.

1. Peningkatan nasionalisme.
2. Peningkatan peran serta semua lapisan masyarakat.
3. Peningkatan kelembagaan demokrasi yang kuat.
4. Pengembangan kebudayaan berdasarkan nilai-nilai budaya luhur.

Dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang belakangan dirasakan mulai memudar di tengah masyarakat, Gubernur mengeluarkan edaran untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali mengkumandangkan lagu-lagu perjuangan, khususnya di sekolah-sekolah.

Agenda keempat, membangun ekonomi daerah termasuk pengentasan kemiskinan.

1. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan.
2. Pembangunan industri berbasis pertanian.
3. Pembangunan kepariwisataan.
4. Revitalisasi koperasi dan UKM.
5. Peningkatan investasi dan peranan BUMD.
6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Peningkatan pembangunan pedesaan dan wilayah tertinggal.

8. Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.
9. Penyempurnaan dan pengembangan statistik.

Untuk mewujudkan agenda pembangunan keempat itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan berbagai bantuan untuk pertanian dan peternakan kepada petani dan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan yang disalurkan itu antara lain berupa 38 unit handtraktor, 56 unit power thresher, 49 unit corn sheller, 28 unit pompa air, 1.125 ton benih padi hibrida dan 120 ton benih kedelai. Bantuan ini diserahkan kepada sejumlah kelompok tani di Sumut. Kemudian ada juga bantuan yang berasal dari dinas peternakan berupa 25 ekor kambing etawa dan 6 ekor sapi kepada kelompok tani.

Dari dinas perkebunan Sumut berupa 1.000 batang bibit kopi arabika, 240 batang bibit karet PB 260 dan 200 batang bibit kakao okulasi TSH 858. Sementara dari dinas perikanan berupa benih ikan bandeng 9.000 ekor dan 7.500 ekor benih ikan nila. Dari dinas kehutanan berupa 500 batang bibit mahoni, 200 batang bibit mangrove dan 100 batang bibit cingkam. Sementara dari badan ketahanan pangan Provsu berupa dana bantuan untuk daerah rawan pangan sebesar Rp 320 juta kepada 16 kelompok tani di 8 kabupaten. Juga ada bantuan untuk pemanfaatan pekarangan Rp 120 juta kepada 6 kelompok tani di 3 kabupaten

Guna menunjang ketahanan pangan, pemerintah provinsi melalui badan ketahanan pangan tahun ini mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis sebesar Rp 13.7 miliar. Satuan perangkat kerja daerah (SPKD) lingkungan provinsi Sumatera Utara juga sudah menyiapkan rancangan program rakyat tidak lapar sebagai langkah mewujudkan visi misi Gubernur.

Beberapa gambaran program untuk mewujudkan rakyat tidak lapar untuk jangka pendek antara lain meningkatkan volume pemberian beras miskin, peningkatan lapangan pekerjaan, pemberian modal, stabilitas harga pangan di tingkat produsen, operasi pasar bahan pangan tertentu, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat,

penyusunan peta kerawanan pangan, pengembangan desa mandiri dan pengembangan posyandu/puskesmas.

Agenda kelima, membangun sarana dan prasarana daerah

1. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana jalan dan jembatan.
2. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara.
3. Peningkatan pembangunan sumber daya air dan irigasi.
4. Peningkatan pembangunan sumber daya energi.
5. Peningkatan pembangunan prasarana wilayah dan perumahan/pemukiman.
6. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.
7. Penyempurnaan dan pengembangan statistik.
8. Pembangunan pos dan telematika.

Untuk lebih membangun sektor riil, Gubernur membangun jalur komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai komponen strategis di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dengan kalangan pebisnis dan dunia usaha maupun perbankan, seperti pimpinan bank se-Sumatera Utara.

Perintah Harian Gubernur Sumatera Utara⁶⁴:

1. Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jaga Moral, Kehormatan dan Martabat PNS sebagai Payung Anak Negeri.
2. Kuasai, Pahami dan Laksanakan Nilai-nilai Pancasila dan Panca Prasetya Korpri.
3. Tingkatkan Disiplin melalui Taat Azas, Taat Waktu dan Taat Prosedur, guna pencapaian hasil kinerja yang optimal.
4. Tingkatkan Kreatifitas dan Profesionalisme dalam Melayani Masyarakat.
5. Tumbuhkan Soliditas, Kebersamaan dan Kesetiakawanan Korps Pegawai Negeri Sipil.

⁶⁴ Diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

6. Kuasai Tugas Pokok dan Fungsi serta jalin Koordinasi dan Sinerjisitas antar Instansi maupun dengan Jajaran Kabupaten / Kota.
7. Tingkatkan kemampuan Teknologi Informasi untuk mendukung Transparansi dan Akuntabilitas serta kembangkan komunikasi yang tidak berjarak dengan masyarakat.
8. Lakukan Penghematan, Efisiensi dan Pola Hidup Sederhana serta Tanamkan Budaya Malu Korupsi.

2.3.1. Struktur Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

GUBERNUR

H. SYAMSUL ARIFIN SE

GATOT PUJO NUGROHO, ST

RUSTAM EFFENDY NAINGGOLAN

Tabel 2.3 : Asisten

NO.	UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Asisten Pemerintahan	Eselon II A
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Eselon II A
3.	Asisten Kesejahteraan Sosial	Eselon II A
4.	Asisten Administrasi dan Aset	Eselon II A

Sumber BKD Pemprov

Tabel 2.4 : Dinas-Dinas Daerah

NO.	UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Dinas Pendidikan	Eselon II A
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Eselon II A
3.	Dinas Kesehatan	Eselon II A

4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Eselon II A
5.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Eselon II A
6.	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	Eselon II A
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Eselon II A
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Eselon II A
9.	Dinas Kehutanan	Eselon II A
10.	Dinas Perhubungan	Eselon II A
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Eselon II A
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Eselon II A
13.	Dinas Pendapatan	Eselon II A
14.	Dinas Pertanian	Eselon II A
15.	Dinas Perkebunan	Eselon II A
16.	Dinas Pertambangan dan Energi	Eselon II A
17.	Dinas Bina Marga	Eselon II A
18.	Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman	Eselon II A
19.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Eselon II A
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Eselon II A

Sumber BKD Pemprov

Tabel 2.5 : Lembaga Teknis Daerah

NO.	UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Eselon II A
2.	Badan Lingkungan Hidup	Eselon II A
3.	Inspektorat	Eselon II A
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Eselon II A
5.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Eselon II A
6.	Badan Penanaman Modal dan Promosi	Eselon II A
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Eselon II A
8.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Eselon II A
9.	Badan Ketahanan Pangan	Eselon II A
10.	Badan Kepegawaian Daerah	Eselon II A
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Eselon II A
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Eselon II A
13.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Eselon III A
14.	Kantor Penghubung	Eselon III A
15.	Rumah Sakit Umum Jiwa	Eselon III A

Sumber BKD Pemprov

Tabel 2.6 : Sekretariat Dewan Dan Sekretariat Daerah

NO.	UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Sekretariat DPRD SU	Eselon II A
2.	Biro Otonomi Daerah	Eselon II B
3.	Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	Eselon II B
4.	Biro Pemerintahan Umum	Eselon II B
5.	Biro Pembangunan	Eselon II B
6.	Biro Bina Masyarakat dan Sosial	Eselon II B
7.	Biro Perekonomian	Eselon II B
8.	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	Eselon II B
9.	Biro Umum	Eselon II B
10.	Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	Eselon II B
11.	Biro Keuangan	Eselon II B
12.	Biro Hukum	Eselon II B

Sumber BKD Pemprovsu



BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

3.1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistematis dan terukur mampu menampilkan sosok pejabat struktural yang profesional sekaligus berfungsi sebagai pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah juga menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan pemerintah pemerintah yang dimaksud dengan⁶⁵ :

1. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.43 tahun 1999.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000.

2. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
4. Pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi adalah gubernur.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pola karier adalah pola pembinaan pegawai negeri sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterangan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah⁶⁶ :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
2. Serendah – rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000.

6. Sehat jasmani dan rohani.

Di samping persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, di selenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja. Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.
- b. Mencapai batas usia pensiun.
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.
- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- g. Adanya perampingan organisasi pemerintah.
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat. Baperjakat terdiri dari :

- a. Baperjakat Instansi Pusat.

- b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi.
- c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Disamping tugas pokok tersebut, Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :

- a. Seorang Ketua, merangkap anggota.
- b. Paling banyak 6 (enam) orang anggota.
- c. Seorang sekretaris.

Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi, dengan anggota para Pejabat Eselon II, dan Sekretaris secara fungsional dijabat oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Untuk menduduki jabatan struktural seorang pegawai negeri sipil harus melewati jenjang-jenjang kepangkatan yang telah ditetapkan berdasarkan masa dinas, pendidikan,

prestasi dan sebagainya⁶⁷. Berikut adalah jenjang kepangkatan yang harus dilalui oleh seorang pegawai negeri sipil.

Tabel 3.1. : Eselon Dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural

Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang			
	Terendah		Tertinggi	
	Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang
I.a	Pembina Utama madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
I.b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
II.b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
III.b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
IV.a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
IV.b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c

Sumber BKD Pemprovsu

3.2. Rekrutmen Kepala Biro Dan Kepala Dinas Provinsi Sumut Di Bawah Pemerintahan Syamsul Arifin

Di bawah kepemimpinan Gubernur Syamsul Arifin Pemprov Sumut melakukan beberapa mutasi jabatan struktural pada bulan januari, maret dan april 2009. Dan akan dilakukan lagi setelah pemilihan presiden. Rotasi jabatan yang dilakukan berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan perda Sumut No. 7,8,9 tahun 2008. Berikut nama – nama pejabat yang diangkat kedalam jabatan struktural yaitu :

⁶⁷ Wawancara dengan Drs. Zulkarnain (Kasubbid Jabatan Struktural Pemprov Sumut) 28 Mei 2009

Tabel 3.2. : Kepala Biro

N0	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN BARU	JABATAN LAMA
1.	Dra. Hj. Vita Lestari Nasution NIP. 160013109 Pangkat : IV/c	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas di Pemkab Langkat
2.	Drs. H. Muhammad Syafi'i NIP. 140126147 Pangkat : IV/a	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian di Biro Keuangan
3.	Rajali S.Sos NIP. 400038436 Pangkat : IV/a	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah	Kepala Dinas di Pemkab Langkat
4.	Ristanto, SH, SPN NIP. 400037727 Pangkat : IV/b	Kepala Biro Pemerintahan Umum	Kepala Bagian di Biro Pemerintahan Umum
5.	Drs. H. Hasbullah Lubis NIP. 400037602 Pangkat : IV/b	Kepala Biro Pembinaan Masyarakat dan Sosial	Kepala Bagian di Biro Pembinaan Masyarakat dan Sosial
6.	Drs. Bondaharo NIP. 400030591 Pangkat : IV/b	Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah	Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah
7.	H. Bangun Oloan Harahap S.Sos NIP. 010069678 Pangkat : IV/b	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah	Kepala Biro di Biro Pemerintahan

Sumber BKD Pemprov**Tabel 3.3. : Kepala Dinas**

N0	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN BARU	JABATAN LAMA
1.	Ir. Umar Zunaidi Hasibuan, MM	Kepala Dinas Bina Marga	Kepala Badan Diklat

	NIP. 400034997 Pangkat : IV/c		
2.	Ir. Nurlisa Ginting, MSc NIP. 131653978 Pangkat : IV/b	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan
3.	Ir. Washington Tambunan NIP. 100004841 Pangkat : IV/d	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
4.	Drs. Eddy Sofyan, MAP NIP. 400040216 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Badan Komunikasi dan Informatika
5.	Ir. H. Ruslan Efendy, MM NIP. 110036514 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Kepala Dinas di Pemko Medan
6.	Drs. H. Bahrumisyah, MM NIP. 131793434 Pangkat : IV/b	Kepala Dinas Pendidikan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Deli Serdang
7.	Dr. Chandra Syafe'i Sp. OG NIP. 140202045 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
8.	Drs. Naruddin Dalimunthe, MSP NIP. 400031962 Pangkat : IV/b	Kepala Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
9.	Ir. James Budiman Siringoringo NIP. 080063183 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Kehutanan	Kepala Dinas Kehutanan
10.	Drs. Mohd. Hasbi Nasution Msi NIP. 400023299 Pangkat : IV/d	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

11.	H. Sjaruddin, SH NIP. 120122244 Pangkat : IV/d	Kepala Dinas Pendapatan	Kepala Dinas Pendapatan
12.	Rapotan Tambunan, SH NIP. 160034533 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Ir. Syafruddin Siregar, Msi NIP. 400025884 Pangkat : IV/d	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
14.	Drs. Nabari Ginting, Msi NIP. 010076501 Pangkat : IV/d	Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial	Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial
15.	Ir. Yoseph Siswanto NIP. 080056307 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
16.	Drh. Tetty Erlina Lubis, Msi NIP. 080048819 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17.	Ir. H. Aspan Sofian, MM NIP. 4000441709 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Perkebunan	Kepala Dinas dari Pemkab Tapsel
18.	Ir. Jonni Pasaribu NIP. 090013132 Pangkat : IV/c	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sumber BKD Pemprov

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, terdapat perampingan pegawai dalam jabatan struktural yakni dengan menghapuskan jabatan wakil kepala dinas sehingga dengan otomatis jumlah pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural sangat jauh berkurang. Dan dalam pengangkatan pejabat struktural masih digunakan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000. Walau telah di keluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000.

3.3. Analisis Pola perekrutan Kepala Biro Dan Kepala Dinas Pada Pemerintahan Provinsi Sumut Pasca Pilgubsu 2008

Sebanyak 312 jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang meliputi eselon I/b hingga IV/a, akan terhapus akibat penerapan Peraturan Daerah No 7, 8, dan 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah. Hal itu disebabkan struktur lama organisasi Pempropstu berdasarkan Perda No 2, 3, dan 4 Tahun 2001 jumlah jabatan struktural sebanyak 1.657 jabatan. Sedangkan berdasarkan Perda No 7, 8, dan 9 Tahun 2008 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah, jumlahnya berkurang menjadi 1.345 jabatan⁶⁸.

ke-312 jabatan eselon itu masing-masing eselon IV/a dari struktur lama 1.240 jabatan menjadi 964 jabatan, eselon III/a dari 341 jabatan menjadi 320 jabatan atau berkurang 22 jabatan. Kemudian, pada eselon II/b (lingkungan biro dan wakil kepala dinas dan badan) dari 37 jabatan menjadi 12 jabatan atau berkurang 25 jabatan. Sedangkan eselon II/a dari 37 jabatan menjadi 42 jabatan atau bertambah lima jabatan, yakni lima staf ahli gubernur, dan dari Kantor Satpol Pamong Praja menjadi badan.

Sebanyak 42 jabatan di eselon II itu, pada lingkungan sekretariat daerah dengan pangkat eselon II/a diisi oleh lima staf ahli gubernur, empat asisten, dan satu sekretaris dewan, serta eselon II/b diisi oleh 11 biro, pada lembaga teknis, eselon II/a ada 12 jabatan dan dua eselon II/b. Untuk eselon II/a, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesbanglinmas, Badan Diklat, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda), Badan Investasi dan Promosi (Bainprom), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektur

⁶⁸ Wawancara dengan Drs. Zulkarnain (Kasubbid Jabatan Struktural Pemprov Sumut) 28 Mei 2009

Wilayah, serta Badan Satpol PP (dari eselon III/a menjadi eselon II/a). Untuk eselon II/b, Rumah Sakit Jiwa dan Kantor Perwakilan Jakarta.

Sedangkan dinas dengan jabatan eselon II/a ada 20 jabatan, yakni Bina Marga, Pengolahan Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Pemukiman, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Kelautan dan Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Pemuda dan Olahraga, Perkebunan, Pendapatan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Komunikasi dan Informasi. konsekuensi PP 41 Tahun 2007 dan Perda Sumut No 7, 8, dan 9 Tahun 2008 juga mengisyaratkan jabatan fungsional sebanyak 1.437 jabatan. Kemudian penambahan jabatan eselon II/a, eselon III/a, dan eselon IV/a pada lima lembaga baru.

Tabel 3.3 : Data Perbandingan Jumlah Jabatan Berdasarkan Perda 2,3,4 Tahun 2001 Dengan Perda 7,8,9 Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Eselon	Berdasarkan Perda 2,3,4/2001 (Struktur Lama)			Berdasarkan Perda 7,8,9/2008 (struktur Baru)			Keterangan
	KTR Dinas	UPT	Total	KTR Dinas	UPT	Total	
I.a	1	-	1	1	-	1	-
II.a	37	-	37	42	-	42	Bertambah 5
II.b	37	-	37	12	-	12	Berkurang 25
III.a	247	111	358	213	111	324	Berkurang 34
III.b	-	-	-	6	-	6	Bertambah 6
IV.a	843	397	1240	576	397	973	Berkurang 267
Jumlah	1165	508	1673	850	508	1358	Berkurang 315

Sumber BKD Pemprov

Keterangan :

Belum Termasuk Lembaga Lain Yang Bertambah :

- a. Badan Penanggulangan Bencana
- b. Badan narkotika Provinsi
- c. Badan Kordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- d. Badan Pelayanan Perizinan Satu Atap/Terpadu
- e. Sekretariat Kopri
- f. Sekretariat KPID (Eselon III.a)

Pada keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 821.23/302/2009 tertanggal 29 januari 2009⁶⁹, merupakan mutasi jabatan struktural yang pertama sekali dilakukan oleh Gubernur terhadap 18 pejabat, menetapkan dua pejabat struktural baru yang ikut dilantik, yakni staf Badan Diklat Provinsi Sumut Maulana Pohan yang menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Djaili Azwar yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut.

Sisanya merupakan pejabat struktural lama yang sebagian menempati pos lamanya yang kini berubah nama, maupun dimutasikan ke pos baru. Pejabat lama yang tetap dilantik untuk posisinya yang lama adalah Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Washington Tambunan, Kepala Inspektorat Nurdin Lubis dan Sekretaris DPRD Sumut Ridwan Bustan. Sedangkan pejabat yang menempati pos lama namun dengan nama instansi yang baru adalah, Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Eddy Syofian yang kini instansinya berganti nama menjadi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Syamsul Arifin yang kini menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pejabat lainnya dimutasikan ke SKPD baru seperti Asisten Bina Hukum dan Sosial Setda Rahudman Harahap menjadi Asisten Administrasi Umum dan Aset, Kepala Badan

⁶⁹ keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 821.23/302/2009 tanggal 29 januari 2009

Diklat Umar Zunaidi menjadi Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Nurlisa Ginting menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mangasing Mungkur menjadi Kepala Badan Diklat, Kepala Biro Pemerintahan Arsyad Lubis menjadi Kepala BKD, Kepala Badan Investasi dan Promosi menjadi Staf Ahli Gubernur, Wakil Kepala Badan Investasi dan Promosi Martinus Lase menjadi Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daudsyah menjadi Staf Ahli Gubernur, dan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riadil Akhir Lubis yang naik menjadi Kepala Bappeda. Pelantikan ke-18 pejabat ini merupakan tahap pertama *restrukturisasi* pejabat eselon dua di Provinsi Sumatera Utara. Pelantikan ini sekaligus juga peresmian beberapa nama satuan kerja perangkat daerah yang diubah sesuai ketentuan PP No. 41 tahun 2007.

Berikutnya lahir keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 821.23/726/2009 tertanggal 17 maret 2009⁷⁰, yang menetapkan pejabat eselon II untuk ditetapkan ke dalam jabatan struktural dan merupakan mutasi tahap kedua yang dilakukan oleh Gubernur di masa pemerintahannya pasca pilgubsu 2008. Berikut rincian 14 pejabat yang di angkat dalam jabatan struktural yakni: Ir H Ruslan Efendy MM menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu, Drs H Bahrumisyah MM menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provsu, Dr Chandra Syafe'I SpOG menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provsu, Drs Naruddin Dalimunthe MSP menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provsu, Ir James Budiman Siringoringo menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provsu, dan Drs H Mohd Hasbi Nasution MSi menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu.

Selanjutnya, H Sjaruddin SH menjadi Kepala Dinas Pendapatan Provsu, Rapotan Tambunan SH menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu, Drs Rusli Abdullah menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provsu,

⁷⁰ keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 821.23/726/2009 tertanggal 17 maret 2009

Anggiat Hutagalung SH menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provsu, Drs H Muhammad Syafi'I MSi menjadi Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu, Rajali Ssos menjadi Kepala Biro Umum Setdaprovsu, Ristanto SH SPN menjadi Kepala Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, dan Drs H Hasbullah Lubis menjadi Kepala Biro Bina Masyarakat dan Sosial Setdaprovsu.

Dan yang terakhir keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 821.23/1331/2009 tanggal 14 mei 2009⁷¹. Melakukan mutasi 11 pejabat ke dalam jabatan struktural yaitu : Ir. Syafruddin Siregar, Msi menjadi kepala dinas penataan ruang dan pemukiman, Drs. Nabari Ginting, Msi menjadi kepala dinas kesejahteraan dan sosial, Ir. Yoseph Siswanto menjadi kepala dinas kelautan dan perikanan, Drh. Tetty Erlina Lubis, Msi menjadi kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan, Ir. H. Aspan Sofian, MM menjadi kepala dinas perkebunan, Ir. Jonni Pasaribu menjadi kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Salman Ginting, SH, MAP menjadi kepala badan penanaman modal dan promosi, Drs. Syaiful Syafri, MM, menjadi kepala badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi, Drs. Bondaharo menjadi kepala biro perlengkapan dan pengelolaan aset sekretariat daerah, H. Bangun Oloan Harahap, S.Sos menjadi kepala biro perekonomian sekretariat daerah.

Dalam mutasi pertama yang dilakukan oleh Gubernur, penulis tidak melihat adanya masalah dalam proses rekrutmen yang dilakukan karena lebih berdasarkan pertimbangan dari baperjakat. Khusus kepada jabatan kepala biro dan kepala dinas, pejabat-pejabat yang diangkat merupakan pejabat lama dan pejabat yang mendapatkan promosi (kenaikan jabatan), sebab mereka adalah kalangan birokrat yang telah cukup teruji kinerja dan kemampuannya. Tercatat 4 pejabat diangkat ke dalam jabatan kepala biro dan kepala dinas yakni Ir. Umar Zunaidi Hasibuan menjadi kepala dinas bina marga yang berasal dari kepala badan diklat di Pemprov Sumut, Ir. Nurlisa Ginting, MSc sebagai kepala dinas

⁷¹ Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 821.23/1331/2009 tanggal 14 mei 2009

kebudayaan dan pariwisata yang berasal dari kepala biro pemberdayaan perempuan serta Ir. Washington Tambunan kepala dinas pertambangan dan energi dan Drs. Eddy Sofyan kepala dinas komunikasi dan informatika yang berasal dari jabatan yang sama.

Hal ini melihatkan optimisme kerja Gubernur dalam mengemban visi misinya dalam menciptakan pemerintahan yang baik dengan menempatkan pejabat-pejabat lama dalam posisi struktural di pemerintahannya. Pada mutasi ini pejabat yang diangkat merupakan orang-orang yang berkualitas sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya. Sebab hanya dengan pejabat-pejabat yang telah teruji kemampuannya yang akan dapat mengemban amanah dalam menjalankan visi misi sang Gubernur.

Namun pada mutasi jabatan struktural tahap kedua penulis melihat sedikit keganjilan. Sebab pada satuan perangkat kerja daerah yang di lantik terlihat beberapa pejabat yang diangkat berasal dari Pemerintahan Kabupaten Langkat, dimana Pemerintahan Kabupaten Langkat merupakan tempat Gubernur menjadi Bupati sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut. Hal ini mengindikasikan Gubernur Syamyul Arifin membawa orang-orangnya untuk ditempatkan dalam jabatan struktural di Pemerintahan Provinsi Sumut, namun indikasi bahwa orang pejabat yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten Langkat di angkat berdasarkan bagi-bagi jabatan oleh Gubernur Syamsul Arifin sulit untuk di deteksi⁷². Sebab Gubernur telah mengetahui kualitas kerja mereka dahulu ketika masih menjabat sebagai Bupati sehingga ditempatkan dalam jabatan struktural guna mendukung visi misi Gubernur.

Selain itu juga terdapat pejabat yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintahan Kota Medan diangkat ke dalam jabatan struktural yakni sebagai kepala dinas pendidikan dan kepala dinas pengelolaan sumber daya air. Dan 6 pejabat lainnya merupakan orang-orang lama yang dipercayakan kembali untuk menduduki posisi yang telah

⁷² Wawancara dengan Drs. Ridwan Rangkuti (Dosen Fisip-Usu) 13 juni 2009

mereka duduki serta 3 pejabat mendapatkan promosi kenaikan jabatan untuk menjabat sebagai kepala pada biro keuangan, biro pemerintahan dan biro bina masyarakat dan sosial. Yang berasal dari biro yang sama dan telah lama menjabat sebagai kepala bagian di biro masing-masing.

Dan pada mutasi ketiga yang dilakukan oleh Gubernur penulis juga tidak melihat adanya suatu yang salah dalam menempatkan pejabat ke dalam jabatan struktural sebab Gubernur masih juga mempercayakan jabatan-jabatan struktural tersebut kepada pejabat lama. Dan 2 jabatan di isi oleh pejabat yang mendapatkan promosi yakni sebagai kepala biro perlengkapan dan pengelolaan aset sekretariat daerah dan kepala biro perekonomian sekretariat daerah. Walaupun juga terdapat pejabat yang berasal dari luar pemerintahan Provinsi yakni kepala dinas perhubungan yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan namun sudah melalui prosedur yang telah disyaratkan⁷³.

Dampak dari keseluruhan mutasi satuan perangkat kerja daerah yang telah dilakukan Gubernur Syamsul Arifin menyisakan para pejabat yang turut diberhentikan dalam surat keputusan pengangkatan pejabat ke dalam jabatan struktural yakni, Ir. Hafas Fadilla menjadi *non job* sebelumnya menjabat kepala dinas pengairan, Nurdin Pane, SE menjadi *non job* sebelumnya kepala biro umum sekretariat daerah, Zulkarnaen, SH menjadi kepala dinas di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebelumnya menjabat kepala biro bina masyarakat dan sosial, Drs. Busral manan menjadi *non job* sebelumnya menjabat kepala biro perlengkapan dan terakhir Ir. Jhon Edin Lumban Gaol menjadi *non job* sebelumnya menjabat kepala biro Bina Perekonomian.

Dan untuk mutasi jabatan lainnya akan dilakukan setelah pemilihan presiden bulan juli. Hal ini dikarenakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sedang berkonsentrasi dalam persiapan pemilihan presiden, sehingga proses rekrutmen yang menyisakan 2 jabatan kepala

⁷³ Wawancara dengan Drs. Suherman (Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai Pemprov) 29 mei 2009

dinas yakni dinas pertanian dan dinas pemuda dan olah raga, serta 4 jabatan kepala biro yakni biro hukum, biro organisai, biro otonomi daerah, biro administrasi pembangunan. Dan juga 2 badan yakni badan kesbanglinmas dan badan ketata panganan⁷⁴.

Keseluruhan mutasi atau rekrutmen yang dilakukan Gubernur bertujuan untuk mendukung visi misi Gubernur yakni rakyat tidak lapar, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak sakit dan rakyat mempunyai masa depan. Sehingga berdasarkan analisis penulis, Gubernur masih mempercayakan jabatan-jabatan struktural kepada para pejabat yang lama berdasarkan atas rekomendasi dan penilaian dari baperjakat bahwasanya pejabat-pejabat lama merupakan orang-orang yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya dan dapat mendukung visi misi Gubernur. Selain itu hal ini juga berarti Gubernur merasa puas melihat kinerja para pejabat lama memang baik dan bagus sehingga layak dan mendukung untuk dipertahankan⁷⁵.

Selain itu banyak pejabat yang diangkat kedalam jabatan struktural merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya terbukti dengan banyaknya pegawai yang mendapat promosi atau kenaikan pangkat menjadi kepala biro dan kepala dinas mereka merupakan pejabat-pejabat yang diajukan oleh baperjakat melalui penilaian masa dinas dan prestasi kerja sehingga layak di ajukan untuk menduduki jabatan struktural yang ada sesuai dengan bidang dan kemampuan pejabat tersebut.

Dan dalam rekrutmen ini Gubernur juga berhasil menghilangkan sikap curiga publik terhadap proses rekrutmen yang akan dilakukan, dengan menempatkan orang-orang yang telah mendapatkan penilaian khusus oleh baperjakat dan penilaian akhir dilakukan oleh Gubernur sebab dalam menempatkan pejabat ke dalam jabatan struktural merupakan hak *preogratif* Gubernur namun tidak mengindahkan penilaian dari baperjakat dan bergantung kepada intervensi dari luar.

⁷⁴ Wawancara Dengan Drs. Suherman (Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai Pemprovsu) 29 mei 2009

⁷⁵ Wawancara Dengan Rizal Sirait (Ketua Fraksi PPP DPRDSU) 24 juni 2009

Rekrutmen ini juga menghapuskan kecurigaan adanya bargaining atau tawar menawar Gubernur dengan partai politik ataupun kelompok bayangan dalam menentukan pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural. Ini merupakan hal yang baik sebab Gubernur tidak menggunakan kekuasaannya sebagai mesin politik untuk mencapai tujuan atau ambisi pribadinya dan lebih mengedepankan profesional dan rasional dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam hal ini kekuasaan politik yang melakukan intervensi dapat di cegah sepanjang Gubernur bertindak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Gubernur dapat diterima sepanjang orang-orang yang diangkat dapat bekerja dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Dalam rekrutmen kepala biro dan kepala dinas hubungan birokrasi dan politik tetap terjalin namun bukan dalam hal sikap menentukan pejabat yang diangkat kedalam jabatan struktural namun lebih kepada pengawasan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Gubernur⁷⁶. Oleh karena itu rekrutmen jabatan struktural ini merupakan hal yang positif dalam menciptakan suasana pemerintahan yang baik menuju tercapainya cita-cita good governance.

Hingga kini adanya tekanan dari partai politik dan kelompok pemilik modal yang membantu Gubernur dalam mencalonkan diri ketika maju dalam pilkada Gubernur 2008 dalam menentukan rekrutmen satuan perangkat kerja daerah di jabatan struktural tidak terbukti dan masih bersifat intervensi yang positif dimana intervensi yang dilakukan tujuannya bukan bersifat pribadi namun lebih kepada kepentingan umum. Dan intervensi ini berusaha untuk mempercepat terciptanya pemerintahan yang lebih baik di bawah kepemimpinan Gubernur Syamsul Arifin, SE yang jujur, adil dan profesional.

⁷⁶ Wawancara Dengan Kristian Sinaga S.Sos, MM (Wakil Gubernur LIRA Sumut) 25 juni 2009

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan tulisan ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan, yakni :

Pertama, rekrutmen yang dilakukan oleh Gubernur Syamsul Arifin SE pasca pilgubsu 2008 masih cenderung kepada merit system atau penempatan seseorang berdasarkan karir dan prestasi yang dalam perkembangannya orang ini naik tingkat melalui tingkatan yang sudah diketahui hingga mencapai puncak jabatan dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang tertinggi. Bukan berdasarkan spoil system atau berdasarkan kepada persahabatan dan bagi-bagi jabatan. Rekrutmen ini juga menjawab pola rekrutmen yang dilakukan oleh gubernur lebih kepada rekomendasi atau penilaian dari baperjakat sebagai institusi yang berwenang memberikan penilaian dan saran kepada Gubernur untuk menempatkan seseorang pegawai kedalam jabatan struktural sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bukan lebih kepada sistem suka atau tidak suka (*like or dislike*). Terbukti dengan pengangkatan pejabat ke dalam jabatan struktural tidak jauh dari yang diajukan oleh baperjakat.

Kedua, rekrutmen yang dilakukan Gubernur bukan merupakan bentuk penolakan terhadap kinerja pejabat lama terbukti dengan rekrutmen yang dilakukan masih di isi dengan wajah-wajah lama pejabat struktural. Dan ini mengindikasikan bentuk apresiasi Gubernur terhadap kinerja para pejabat lama. Dalam hal ini pejabat lama telah bekerja dengan baik ditambah dengan promosi terhadap pegawai yang telah bekerja dengan baik sehingga mendapatkan kenaikan jabatan dan menduduki jabatan kepala biro dan kepala dinas. Hal ini mencerminkan optimisme Gubernur dalam kinerja dan pemerintahan yang lebih baik di bawah kepemimpinannya.

Ketiga, tuduhan bahwasanya Gubernur melakukan rekrutmen di luar baperjakat dan mendapatkan intervensi dari luar baik oleh partai politik pendukung maupun para pemilik modal atau kelompok bayangan dalam menempatkan pejabat ke dalam jabatan struktural adalah tidak benar. Dan tidak ditemukan adanya tawar menawar atau bargaining dalam menentukan pejabat ke dalam jabatan struktural. Kalaupun Gubernur terlat dalam memutuskan orang-orang yang diangkat hal ini lebih kepada kecerdasan emosional untuk lebih berhati-hati dan tidak emosi dalam memilih orang-orang yang tepat sehingga visi misi yang diamanahkan dapat berjalan dengan baik. tergambar tidak ada unsur kepentingan tertentu yang bersifat subjektif dalam menetapkan pejabat dalam jabatan struktural, melainkan sepenuhnya mengedepankan kompetensi dan profesionalisme objektif untuk optimisme kinerja birokrasi

Kelima, kalaupun terdapat pejabat yang diangkat ke dalam jabatan struktural berasal dari Pemerintahan Kabupaten/Kota, semuanya telah melalui mekanisme dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Dan mereka yang terpilih berasal dari Pemerintahan Kabupaten/Kota bukan dipilih berdasarkan bagi-bagi jabatan namun lebih kepada kemampuan dan masa dinas mereka yang telah teruji dan baik. Dan untuk itu mereka layak dalam menempati jabatan struktural pada Pemerintahan Provinsi.

Keenam, di tinjau dari teori rekrutmen politik, rekrutmen yang dilakukan oleh Gubernur ini sesuai dengan sistem rotasi. Dimana rekrutmen dan mutasi yang dilakukan berdasarkan masa dinas kerja yang telah dilewati oleh seorang pegawai sehingga dapat memasuki jenjang karir berikutnya. Dan bukan rekrutmen berdasarkan kepentingan untuk mencapai hal tertentu yang bersifat keuntungan pribadi.

Ketujuh, rekrutmen kepala biro dan kepala dinas ini masih menyisakan berbagai persoalan yakni, kepala biro dan kepala dinas yang diangkat belum dapat bekerja dengan maksimal dan tidak dapat menunjukkan program kerja mereka. Hal ini menjadi penghambat

tugas mereka dalam menjalankan visi misi Gubernur, pada hal program kerja merupakan hal yang penting untuk dipersiapkan guna mendukung kinerja yang lebih baik. Walaupun Gubernur mengadakan evaluasi dengan periodik 6 bulan sekali guna mengetahui pencapaian kinerja yang dilakukan oleh kepala biro dan kepala dinas dan menyiapkan sanksi kepada pejabat yang tidak dapat bekerja dengan baik termasuk dengan mengganti pejabat tersebut. Tidak menjadi patokan bahwasanya kepala biro dan kepala dinas bekerja dengan maksimal untuk itu butuh dukungan oleh semua pihak agar pencapaian target sesuai dengan visi misi Gubernur yang dilakukan oleh kepala biro dan kepala dinas dapat berjalan dengan baik, hal ini juga disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki dan diterima oleh kepala biro dan kepala dinas.

Kedelapan, dampak penerapan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 dan Perda No. 7,8,9 tahun 2008 terdapat perampangan dan penyusutan sejumlah pegawai dalam jabatan struktural yang ada mengakibatkan banyaknya pegawai yang tidak memiliki jabatan. Jabatan eselon II yang terpangkas merupakan jabatan wakil pimpinan SKPD. penghapusan lebih dari 200 jabatan struktural tersebut menimbulkan persoalan tersendiri, yakni bertambahnya jumlah pengangguran terselebung di pemerintahan. Pemprov Sumut harus berpikir soal dampak penghapusan jabatan struktural tersebut. Akan makin banyak jumlah pengangguran terselubung di Pemerintahan Provinsi. Ada nama pegawai, tetapi enggak ada mejanya. Pemprov Sumut juga harus berpikir soal kebutuhan pelayanan publik yang proporsional dengan upaya penyederhanaan struktur pemerintah daerah. Idealnya organisasi pemerintah daerah itu proporsional. dikhawatirkan struktur itu mengalami disfungsi karena terlalu gemuk atau terlalu kurus.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan tulisan ini, maka penulis menyarankan :

Pertama, perlu adanya sosialisasi kepada publik terhadap para pejabat yang diajukan oleh baperjakat untuk diangkat oleh Gubernur kedalam jabatan struktural. Sehingga pemikiran negatif terhadap proses rekrutmen dapat dihilangkan. Latar belakang para pejabat yang diangkat harus di umumkan kepada publik dan ini seharusnya menjadi tugas dinas informasi dan komunikasi yang seharusnya sebagai lembaga pencitraan untuk mengumumkan hal tersebut.

Kedua, perlu adanya konsultan independen untuk ditempatkan di baperjakat guna mengawasi kinerja baperjakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam mengusulkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan struktural kepada Gubernur yang telah teruji kemampuan, Sehingga independensi dan netralitas baperjakat tidak diragukan.

Ketiga, pemerintah harus segera menepatkan para pejabat yang tidak masuk ke dalam satuan perangkat kerja daerah atau perampingan organisasi untuk ditempatkan pada daerah kabupaten/kota yang baru mengalami pemekaran sehingga pejabat yang tidak masuk kedalam satuan perangkat kerja daerah tidak menjadi pegawai yang pengangguran.

Keempat, untuk pejabat yang diangkat mengisi jabatan struktural perlu diadakan *fit and proper test* melalui dewan perwakilan rakyat guna mengetahui kemampuan pejabat yang diangkat kedalam jabatan struktural tersebut.

Kelima, pejabat yang diangkat kedalam jabatan struktural wajib memiliki program kerja sehingga dapat diketahui apa yang akan dilakukannya setelah dilantik ke dalam jabatan struktural dan dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila gagal dalam menjalankan program kerja yang telah dipersiapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Buku

Albrow, Martin, *Bureaucratic*, New York: Frederick A Praeger, 1970.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Ikbal, Yanuar, *Ekonomi Politik Internasional, Implementasi Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Kristian, Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000

Moelong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1990.

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.

- P. Anthonius, Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Pamoedji, *Pokok-Pokok Kebijakan dan Teknik Management Kepegawaian*, Jakarta: Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, 1974.
- Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Riswanda, Imawan, *Catatan Dari Kaki Merapi*, Pusataka Pelajar: Jakarta, 1996
- Rozi, Syafuan, *Zaman Bergerak Reformasi Dirombak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
- Sahdan, Gregorius, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Bantul: Pustaka Yogya Mandiri, 2004.
- Slossa, S. Daniel, *Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Secara Langsung*, Yogyakarta: Media Presindo, 2005.
- Subhilhar, H. Kusmanto, *Politik Pilkada di Sumatera Utara, Kumpulan Opini Mengenai Pilgubsu*, Medan, Fisip USU Press, 2008.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta, 1992.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Makalah

<http://www.google.com/Kesimpulan/Dari/Politik/Birokrasi/Indonesia/Birokrasi-Tunjung-Sulaksono-S.IP.html> diakses tanggal 2 februari 2009.

<http://www.google.com/defenisi/birokrasi/catatan-mr-kopetz.html> diakses pada tanggal 1 maret 2009

<http://www.google.com/Makalah/Birokrasi/Keputusan-Pejabat-Birokrasi-dan-Dilema-Yurisdiksi-Peradilan.pdf> diakses pada tanggal 9 februari 2009.

Dapat dilihat pada <http://www.google.co.id/bisnis/dan/politik/di/tingkat/lokal/pengusaha/penguasa/&penyelenggaraan/pemerintahan/daerah/pasca/pilkada.html> dikases tanggal 15 maret 2009

Dapat dilihat pada <http://www.google.com/Relasi/Kekuasaan/dan/Arsitektur/Dari/Dekonstruksi/ke/Sustaiable/city.pdf> diakses tanggal 16 maret 2009

Internet

<http://www.pusdatinkomtel-depdagri.go.id/sejarah/sumatera/utara.html> diakses pada tanggal 20 mei 2009.

<http://www.sejarahbangsaindonesia.co.cc/sejarah/sumatera/utara.html> diakses pada tanggal 19 mei 2009.

<http://www.wikipedia.com/Search/Anarko/Primitivisme.html> diakses pada tanggal 15 februari 2009.

<http://www.sumutprov.go.id/8/perintah/harian/gubsu.html> diakses pada tanggal 19 mei 2009

<http://www.wikipedia.com/Search/Kekuasaan.html> diakses tanggal pada 15 februari 2009.

<http://www.wikipedia.com/Search/Politik.html> diakses pada tanggal 29 januari 2009.

<http://www.wikipedia.com/Birokrasi.html> diakses pada tanggal 9 februari 2009.

<http://www.kpusumut.org> rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi. Diakses pada tanggal 11 februari 2008.

<http://www.bainfokomsu-online.com/Indeks-Berita/Pelantikan-Eselon-II-Pekan-Ini.html> diakses pada tanggal 13 februari 2009.

<http://www.kapanlagi.com> kamus online Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris. Diakses pada tanggal 14 februari 2009.

Sumber lain

Harian Medan Bisnis Edisi 5 Juni 2008, Medan, Ibnu Asqori Pohan, Gubernur dan Dilema Dividen Government.

Harian Waspada Edisi 5 Januari 2009, Medan, Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

Harian Waspada Edisi 2 Februari 2009, Medan, Kabinet Pertama Syamsyul, Cerminkan Optimisme Birokrasi.

Harian Waspada Edisi 3 februari 2009, Medan, Warjio, Kabinet Syampurno dan Ekonomi Politik Bayangan.

Harian waspada Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Senin 5 januari 2009

Harian Sinar Indonesia Baru Edisi 19 Maret 2009, Medan, Gubsu, Enam Bulan Evaluasi Jabatan Bisa Saya Copot.

Harian Waspada Edisi 15 Oktober 2008, Sakhyan Asmara, Medan, Memahami Gaya Kepemimpinan Syamsyul.

WAWANCARA

Kristian Sinaga Wakil Gubernur Lira Sumut

Drs Suherman Kabid pengembangan dan pemberdayaan pegawai pemprov Sumut

Drs. Zulkarnain Kasubbdj jabatan struktural pemprov Sumut

Drs. Ridwan Rangkuti Dosen Fisip USU

Rizal Sirait Ketua Fraksi PPP DPRDSU